

**Analisis Program Inklusi Sosial dengan Menggunakan Peraturan
Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023 (Studi Kasus
pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Khalis Anwar

NIM. 190503056

Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan
Fakultas Adab dan Humaniora



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2024 M / 1446 H**

**EVALUASI PROGRAM INKLUSI SOSIAL DENGAN MENGGUNAKAN
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NO. 3 TAHUN
2023 (STUDI KASUS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PIDIE)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu (S1) Ilmu Perpustakaan**

Diajukan Oleh:

**KHALIS ANWAR
NIM.190503056**

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Strata Satu (S1) Ilmu Perpustakaan**

Disetujui Untuk Sidang Munaqasyah Oleh:

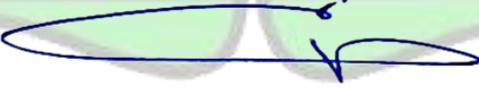
Pembimbing I


**Dr. Zubaidah, S.Ag., M.Ed.
NIP.197004242001122001**

Pembimbing II


**Asnawi, S.IP., M.IP
NIP.198811222020121010**

**Disetujui Oleh Ketua Prodi
Ilmu Perpustakaan R.Y**


**Mukhtaruddin, S.Ag., M.LIS.
NIP.197711152009121001**

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Strata Satu (S1) Ilmu Perpustakaan**

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 19 Agustus 2024 M

14 Safar 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

Sekretaris


Dr. Zubaidal, S.Ag., M.Ed.
NIP. 19700424200122001


Asnawi, S.IP., M.IP.
NIP. 198811222020121010

Penguji I

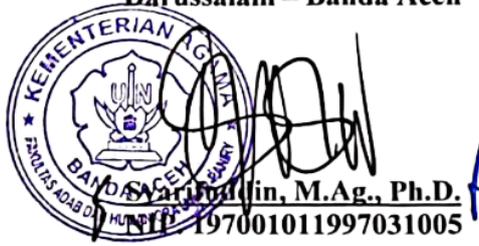
Penguji II


Drs. Anwar Daud, M.Hum.
NIP. 19621231199101002


Zikrayanti, M.LIS
NIP. 198411242023212019

Mengetahui

**Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN-Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh**


Sarifuddin, M.Ag., Ph.D.
NIP. 197001011997031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khalis Anwar
NIM : 190503056
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Prodi : Ilmu Perpustakaan
Judul Skripsi : Analisis Program Inklusi Sosial dengan Menggunakan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023 (Studi Kasus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidic)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2024

Penulis



Khalis Anwar

NIM. 190503056

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Analisis Program Inklusi Sosial dengan Menggunakan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023 (Studi Kasus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie)**. Shalawat dan salam juga penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan pencerahan bagi kita umatnya, sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis susun untuk melengkapi sebagian syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana (S1) pada program studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada orang tua tercinta Ayahanda Anwar dan Ibunda Azmiah yang memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis hingga sekarang.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada saudara kandung tercinta Azizzia, Alfi Syahrin, Nuzula Rahmatillah, Faiza Akmalia dan saudara sepupu Munawarah, Lia Zahara, Mufazzal, beserta seluruh keluarga besar penulis, dengan tulus penulis ucapkan terima kasih atas curahan kasih sayang, doa, nasihat, motivasi

dan dukungan materil selama penulis menempuh studi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada Rektor dan Wakil Rektor serta segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah menyediakan fasilitas penunjang perkuliahan dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan lancar.

Terima kasih kepada Bapak Mukhtaruddin, M.LIS selaku Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan, dan Bapak T. Mulkan Safri, M.IP selaku Sekretaris, serta jajaran Staf Prodi Ilmu Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Ibu Dr. Zubaidah, M.Ed selaku pembimbing pertama dan Bapak Asnawi, S.IP., M.IP selaku pembimbing kedua yang telah sabar meluangkan waktunya merelakan tenaga dan pikiran serta turut memberi perhatian dalam memberikan pendampingan selama proses penelitian skripsi ini, serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Adab dan Humaniora yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan urusan perkuliahan ini dengan baik.

Terima kasih kepada Ibu Yurni, S.E dan Ibu Syarifah Faiza, S.Sos serta pengelola perpustakaan desa binaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data yang akurat terkait penelitian yang penulis lakukan. Selanjutnya, tidak lupa pula terima kasih penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yang sangat penulis banggakan yang selalu setia mendukung, mensupport apa yang selama ini penulis hadapi. Terimakasih kepada Maulana Ikhsan, Alham Mulia Ahda, Muhajir

Maulidi, Muhammad Gunawan, Syuhada Aulia, Ziyad Rizqullah Husni, Lina Khairina, Farah Futhira, Fajrina Novita serta seluruh keluarga besar Ilmu Perpustakaan leting 19 yang selalu memberikan motivasi, saran terbaik yang penulis butuhkan dan menyemangati dikala mental sedang down, terimakasih untuk kebersamaan kita.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penelitiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa yang disumbangkan oleh semua pihak. Aamiin.

Banda Aceh, 19 Agustus 2024

Khalis Anwar
NIM. 190503056



DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN SIDANG	i
SURAT PENGESAHAN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penejelasan Istilah	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	12
A. Kajian Pustaka	12
B. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	20
1. Pengertian Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	20
2. Tujuan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.....	22
3. Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	25
C. Program Inklusi Sosial	30
D. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023	32
1. Seleksi Perpustakaan penerima program TPBIS	33
2. Sosialisasi Program Program TPBIS.....	33
3. Penetapan dan Pembekalan <i>Master Trainer</i>	33
4. Penetapan dan Pelatihan Fasilitator Daerah	34
5. Pertemuan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Meeting</i>).....	34

6. Pertemuan Pembelajaran Sebaya (<i>Peer Learning Meeting</i>).....	35
7. Monitoring dan Evaluasi	35
8. Publikasi Program	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Rancangan Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Fokus Penelitian	40
D. Subjek dan Objek Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Profil Perpustakaan Dispersip Pidie.....	54
2. Visi dan Misi Dispersip Pidie	55
3. Alur Peminjaman Buku.....	56
4. Struktur Perpustakaan	57
5. Fasilitas Perpustakaan	58
6. Layanan Perpustakaan.....	59
7. Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	60
B. Hasil Penelitian.....	61
1. Program Inkusi Sosial Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023.....	61
C. Pembahasan	79
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Indikator Penelitian Berdasarkan Peraturan Kepala Perpusnas	44
Tabel 3. 2 Indikator Penelitian Berdasarkan Peraturan Kepala Perpusnas	47
Tabel 3. 3 Daftar Narasumber	49
Tabel 4. 1 Fasilitas Perpustakaan	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 3 Bimtek SPP-TIK.....	80
Gambar 4. 4 Talk Show	80
Gambar 4. 5 Stakeholder Meeting.....	82
Gambar 4. 6 Peer Learning Meeting	83



DAFTAR BAGAN

Bagan 4. 1 Alur Peminjaman Buku.....	56
Bagan 4. 2 Struktur Perpustakaan	57
Bagan 4. 3 Hasil Penelitian Mengenai Program Inkusi Sosial Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023.....	77



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Surat Keputusan Pembimbing Skripsi (SK) Lama
- Lampiran 2** Surat Keputusan Pembimbing Skripsi (SK) Terbaru
- Lampiran 3** Surat Izin Penelitian di Dispersip Pidie
- Lampiran 4** Surat telah Melaksanakan Penelitian Dispersip Pidie
- Lampiran 5** Lembar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 6** Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7** Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Program Inklusi Sosial Menggunakan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023 (Studi Kasus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pustakawan, pengelola perpustakaan desa, dan pemustaka, serta melalui telaah dokumen untuk melengkapi data yang diperlukan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie sudah menjalankan program inklusi sosial sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023. Hal tersebut diketahui dari pelaksanaan seleksi perpustakaan penerima program, sosialisasi program, pelatihan master trainer, fasilitator daerah, pertemuan dengan pemangku kepentingan, pertemuan pembelajaran sebaya, kegiatan monitoring serta evaluasi, dan publikasi program.

Kata Kunci : Program Inklusi Sosial, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program perpustakaan berbasis inklusi sosial fokus pada pelibatan masyarakat dengan harapan membentuk kesejahteraan dan bertambah kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan program perpustakaan berbasis inklusi sosial yang wajib dilandaskan dengan peraturan yang sudah dirancang oleh Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023. Oleh karena itu, perpustakaan harus berubah untuk memberikan layanan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat supaya mencapai tujuan ini. Perpustakaan harus menjadi tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan memperoleh pengetahuan melalui berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.¹ Dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Nomor 3 Tahun 2023, dijelaskan bahwa Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai peningkatan peran dan fungsi perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai tempat pembelajaran seumur hidup, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penggunanya.²

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), yang didukung oleh Bappenas RI dan diluncurkan oleh Perpusnas pada tahun 2018, bertujuan mengubah perpustakaan menjadi tempat bagi masyarakat untuk belajar keterampilan baru, berbagi pengalaman, dan berlatih sesuai dengan kebutuhan

¹ Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, diakses pada tanggal 3 Desember 2023

² *Ibid*

sehari-hari. Pada 2023 program TPBIS telah menjangkau 399 kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Hampir semua daerah mulai menerapkan program perpustakaan berbasis inklusi sosial termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Pidie, provinsi Aceh.³

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 menegaskan bahwa peran dan fungsi perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat perlu ditingkatkan guna memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan cara ini, perpustakaan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional melibatkan partisipasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat fungsi dan peran perpustakaan dalam menyediakan layanan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki serangkaian tanggung jawab untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program tersebut. Beberapa tanggung jawab perpustakaan kabupaten yaitu:

³ Perpusnas, "Rakornas Perpustakaan Tahun 2023 : Inklusi Sosial Menjadi Basis Pembangunan Perpustakaan." 6 Maret 2023, diakses melalui <https://www.perpusnas.go.id/berita/rakornas-Perpustakaan-tahun-2023-inklusi-sosial-menjadi-basis-pembangunan-Perpustakaan> pada 5 Maret 2024

- 1) Perpustakaan bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan yang mengatur pelaksanaan TPBIS ditingkat kabupaten, yang harus selaras dengan arahan kebijakan nasional terkait.
- 2) Pemerintah kabupaten diharapkan untuk melaksanakan sosialisasi yang efektif terkait dengan TPBIS di tingkat kabupaten, sehingga memastikan pemahaman yang luas dan partisipasi yang aktif dari berbagai pihak terkait.
- 3) Perpustakaan kabupaten memiliki peran dalam melakukan advokasi, koordinasi, supervisi, dan pendampingan dalam implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat kabupaten, untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan dan prinsip yang telah ditetapkan.
- 4) Perpustakaan kabupaten diharapkan dapat membangun sinergi antar pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, sehingga tercipta kolaborasi yang efektif dalam mendukung transformasi perpustakaan.
- 5) Perpustakaan kabupaten diminta untuk memfasilitasi pelaksanaan Transformasi perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah desa.
- 6) Perpustakaan kabupaten melakukan perluasan dan replikasi program ke berbagai desa dalam wilayah kabupaten tersebut.
- 7) Pemerintah kabupaten diharapkan dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayahnya, dengan mengadopsi langkah-langkah strategis yang mendukung kelangsungan program ini dalam jangka panjang. Dengan demikian, melalui peran aktif dan koordinasi yang baik dari Pemerintah Daerah, diharapkan Transformasi Perpustakaan

Berbasis Inklusi Sosial dapat memberikan dampak yang signifikan dalam memajukan literasi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁴

Pada *elementary research* penulis telah melakukan wawancara dengan dua pustakawan Dispersip Pidie. Menurut penuturan mereka, sejak tahun 2022 hingga 2024 Dispersip Pidie telah menetapkan berbagai kegiatan inklusi sosial sebagai fokus strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Salah satu program prioritas adalah replikasi mandiri perpustakaan desa. Program ini dirancang untuk memberikan pendampingan intensif kepada para pengelola perpustakaan desa melalui kegiatan mentoring. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memastikan bahwa para pengelola memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk mengimplementasikan program inklusi sosial di desa masing-masing. Dengan demikian, perpustakaan desa diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.⁵

Beberapa program inklusi sosial yang telah diimplementasikan meliputi Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPP-TIK), *Talkshow* Literasi, Sosialisasi Program TPBIS, pelatihan Sistem Informasi Manajemen (SIM), serta berbagai kegiatan sosialisasi lainnya.⁶ Berdasarkan hasil analisis dokumen, Dispersip Pidie kembali menggelar serangkaian agenda program inklusi sosial yang berfokus pada replikasi mandiri

⁴ Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023, diakses pada 25 Januari 2024.

⁵ Wawancara dengan Syarifah Faiza, S. Sos. dan Risma Khairani, SIP. Pustakawan Dispersip Pidie, pada 16 Februari 2024, pukul 10.30 WIB

⁶ Analisis dokumenter program inklusi sosial diakses melalui <https://www.instagram.com/dinas.Perpustakaan.pidie?igsh=OGwyZGh2enljYWd2> pada 3 Juni 2024

perpustakaan desa serta pemberdayaan masyarakat. Program ini dirancang untuk memperkuat peran perpustakaan desa sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan keterampilan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses informasi dan pengetahuan yang lebih luas.

Sejak dimulainya program TPBIS di Dispersip Pidie, sejumlah program telah berhasil diimplementasikan dengan baik. Namun, belum ada analisis yang dilakukan terhadap program-program tersebut oleh pihak manapun. Oleh karena itu, penulis berencana untuk menganalisis pelaksanaan program inklusi sosial yang telah berjalan di Dispersip Pidie, dengan merujuk pada Peraturan Kepala Perpustnas Nomor 3 Tahun 2023.

Berdasarkan penjelasan diatas, program inklusi sosial yang sudah dirancang dan dijalankan oleh Dispersip Pidie perlu dilakukan analisis dengan Peraturan Kepala Perpustnas Nomor 3 Tahun 2023, maka penulis tertarik mengambil judul **“Analisis Program Inklusi Sosial dengan Menggunakan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023 (Studi Kasus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesesuaian program inklusi sosial di Dispersip Pidie dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program inklusi sosial dengan menggunakan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 di Dispersip Pidie.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan ilmiah yang bermanfaat bagi pembaca dan penulis mengenai analisis program inklusi sosial dengan menggunakan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan atau pedoman bagi penulis selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat digunakan sebagai sumber materi atau referensi untuk pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan rekomendasi bagi pengelola Dispersip Pidie dalam mengimplementasikan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- 3) Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pemilihan program inklusi sosial oleh Dispersip Pidie yang relevan dan efektif bagi masyarakat.

E. Penejelasan Istilah

Untuk membantu pembaca memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dan mengurangi kemungkinan pembaca salah memahaminya, penulis memberikan penjelasan tentang konsep-konsep yang sering digunakan dalam literatur ilmiah, sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis menurut Komaruddin dikutip dari Yuni Septiani adalah proses menguraikan sesuatu keseluruhan menjadi komponen-komponen untuk lebih memahami bagian-bagian komponen tersebut, hubungannya dan bagaimana mereka berkontribusi pada keseluruhan yang terpadu.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa, seperti tulisan atau tindakan, untuk memahami keadaan yang sebenarnya, termasuk penyebab dan aspek-aspek terkait.⁸ Analisis dalam perspektif Islam melibatkan penggunaan akal sehat untuk menilai suatu hal dan mencari kesalahan atau kekeliruan melalui proses analisis mendalam.⁹

Analisis yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah suatu metode ilmiah yang bertujuan untuk menguraikan fenomena kompleks menjadi unit-unit yang lebih sederhana. Selanjutnya, metode ini melibatkan penilaian terhadap hubungan antar unit tersebut untuk memperoleh pemahaman yang

⁷ Yuni Septiani, Edo Aribbe, dan Risnal Diansyah, “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrahman Pekanbaru),” (Jurnal Teknologi Dan Open Source, 2020), Vol. 3, No. 1. Hal. 131–43.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pengertian Analisis,” <https://kbbi.web.id/analisis>. Pada Tanggal 4 Februari 2024.

⁹ Maghfiroh, “Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Syariah”. (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021), Vol. 7, No. 01. Hal. 405.

mendalam tentang cara kerja keseluruhan fenomena. Proses ini memungkinkan identifikasi pola, penyebab, dan interaksi yang mungkin tidak tampak jelas pada pandangan pertama, sehingga memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan terperinci mengenai objek yang diteliti.

2. Program

Pengertian program dalam KBBI adalah rancangan mengenai prinsip dan upaya dalam bidang ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya yang akan diimplementasikan.¹⁰ Jika dilihat dari perspektif keagamaan program merupakan pernyataan yang merangkum sejumlah harapan atau tujuan yang saling bergantung dan terkait untuk mencapai satu sasaran yang sama.¹¹ Program adalah kumpulan tujuan dan harapan yang saling terkait dan saling bergantung, dirancang untuk mencapai tujuan yang sama. Biasanya, suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah satu unit administrasi, atau mencakup sasaran yang saling melengkapi dan saling bergantung, yang harus dilaksanakan secara bersamaan atau dalam urutan tertentu.¹² Program adalah rencana yang tersusun secara jelas, mencakup sasaran tertentu, kebijakan, tata cara, anggaran, serta jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.¹³

Program yang penulis maksud adalah suatu rancangan yang sudah disepakati bersama untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam hal ini, program yang

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi oktober 2023, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), diakses pada 3 Juni 2024.

¹¹ Muhaimin, Suti'ah dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009). Hal.349

¹² Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Kencana. Hal. 349.

¹³ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bumi Aksara, 2006), hal. 72.

dimaksud adalah program inklusi sosial yang sudah dirancang melalui musyawarah dengan melihat pedoman pada peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023 yang dilakukan oleh Dispersip Pidie.

3. Inklusi Sosial

Definisi Inklusi Sosial (*social inclusion*) adalah kebalikan dari Eksklusi Sosial (*social exclusion*). Inklusi sosial yang didefinisikan oleh Simarmata dikutip dari Prima Putra adalah proses untuk memungkinkan kelompok orang atau individu tertentu berpartisipasi dalam kehidupan sosial, baik secara penuh maupun sebagian.¹⁴ Inklusi sosial dalam layanan perpustakaan adalah upaya untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki perpustakaan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.¹⁵ Dalam pandangan Islam, inklusi sosial adalah perwujudan dari konsep ukhuwah Islamiyah, yang menekankan pentingnya menghormati dan mendukung hak-hak setiap individu tanpa memandang perbedaan. Hal ini berarti menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan. Konsep ukhuwah Islamiyah menekankan pentingnya menghargai dan mendukung hak-hak setiap individu, terlepas dari perbedaan yang ada.¹⁶ Pandangan inklusi sosial dijelaskan oleh Bank Dunia dikutip dari Dekki Umamur Ra'is adalah proses yang bertujuan untuk memperluas peluang bagi individu dan kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Inklusi sosial adalah

¹⁴ Prima Putra, Budi Gutama, dan Bambang Widiyahseno, “*Inklusi sosial dalam pembangunan desa*”, (2020), Vol 10. Hal. 70.

¹⁵ Zhaochun & Qunqing, *Reaching out to vulnerable groups in China: a broad library with social inclusion* (IFLA Journal, 2008), Vol. 34, Edisi. 1. Hal. 13–19.

¹⁶ Sitti Faoziyah, *Inklusi Sosial Dalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Untuk Semua*, (Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional, 2023), Vol. 5 No. 1. Hal. 50.

prinsip yang menegaskan pentingnya memperlakukan setiap individu dengan adil dan memberikan kesempatan yang sama dalam masyarakat, tanpa memandang perbedaan seperti agama, etnis, atau kondisi fisik.¹⁷

Inklusi sosial yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah program perpustakaan yang bertransformasi secara menyeluruh dari segi layanan dan penerapan program sehingga membentuk perpustakaan yang mendukung hak-hak individu supaya semua pengguna perpustakaan setara dan tidak timbul perbedaan dalam masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pengguna perpustakaan.

4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional

Pada peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 dapat disimpulkan beberapa poin penting, diantaranya:

- a. Sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- b. Penetapan dan pembekalan *master trainer*.
- c. Penetapan dan pelatihan fasilitator daerah.
- d. Pertemuan pemangku kepentingan (*stakeholder meeting*).
- e. Pertemuan pembelajaran sebaya (*peer learning meeting*).
- f. Monitoring dan analisis.
- g. Publikasi program.¹⁸

¹⁷ Dekki Umamur Ra'is, *Peta Inklusi Sosial Dalam Regulasi Desa*, (Reformasi : Malang, 2017), Volume 7 No. 2. Hal. 92.

¹⁸ Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023, diakses pada 28 Januari 2024, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/254810/peraturan-perpusnas-no-3-tahun-2023> pada 28 Januari 2024.

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 yang dimaksud diatas merupakan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan program inklusi sosial yang dipelopori oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Penelitian ini berfokus pada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan tersebut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penyelidikan dalam literatur, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan perpustakaan berbasis prinsip inklusi sosial. Meskipun terdapat kesamaan dengan penelitian ini, perbedaan muncul dalam hal subjek dan objek penelitian, fokus, lokasi, serta periode penelitian. Maka sangat penting untuk menjelaskan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya, seperti:

Penelitian pertama yang berjudul "Efektivitas Program 'Perpuseru' dalam memperluas perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lubuklinggau" oleh Dwi Aprilia pada tahun 2019, bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program "Perpuseru" efektif dalam mengembangkan perpustakaan yang berfokus pada inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lubuklinggau. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kendala-kendala yang dihadapi dalam mengembangkan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lubuklinggau. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan 15 informan terkait. Teknik analisis data yang diterapkan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program "Perpuseru" telah berhasil efektif dalam mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lubuklinggau. Program ini terbukti mencapai sasaran yang telah

ditetapkan, sosialisasi program berjalan dengan baik, dan tujuan program telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengawasan terhadap program juga telah dilaksanakan secara efektif. Namun demikian, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah terbatasnya anggaran yang disediakan. Keterbatasan anggaran ini membuat sulitnya melaksanakan program layanan perpustakaan, seperti program "Perpuseru", terutama dalam menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar bagi masyarakat. Dengan demikian, meskipun program "Perpuseru" terbukti efektif dalam mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan program secara optimal.¹⁹

Penelitian selanjutnya berjudul "Dampak Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Penelitian Pada Perpustakaan Desa Simpang Utama Kabupaten Bener Meriah)" yang diteliti oleh Diana pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian Diana ini adalah untuk mengetahui dampak dari transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial terhadap kesejahteraan masyarakat, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Simpang Utama memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan

¹⁹ Dwi Aprilia, "Efektivitas Program "Perpuseru" dalam mengembangkan Perpustakaan Berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Lubuklinggau", (Skripsi Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, 2019). Diakses melalui <http://repository.radenfatah.ac.id> pada 13 Februari 2024

masyarakat. Kendati demikian, program ini masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, minimnya tenaga pengelola perpustakaan, serta rendahnya minat baca masyarakat.²⁰

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Bulkisma Putri pada tahun 2022 dengan judul "Evaluasi Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah." Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah mengembangkan layanan perpustakaan desa yang berbasis inklusi sosial, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengembangan layanan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah serta mengidentifikasi kendala yang terkait dengan pengembangan layanan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah melibatkan berbagai kegiatan, termasuk pemberian fasilitas, sosialisasi, pelatihan bagi pengelola perpustakaan, revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, advokasi, *peer learning Meeting* (PLM), pertemuan dengan *stakeholder*, dan keterlibatan

²⁰ Diana, "Dampak Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Penelitian Pada Perpustakaan Desa Simpang Utama Kabupaten Bener Meriah)", (Skripsi Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, 2022). Diakses melalui <http://repository.ilpus.ar-raniry.ac.id> pada 13 Februari 2024

masyarakat. Namun, kendala yang dihadapi termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, dan kurangnya dukungan dari pemerintah desa.²¹

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Siti Nurul Kamidah pada tahun 2022 berjudul "Pengembangan Keterampilan Masyarakat melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada Perpustakaan Lentera Desa Buluagung, Trenggalek" bertujuan untuk mendeskripsikan proses transformasi perpustakaan "Lentera Desa" menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial guna meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Penelitian ini melibatkan 8 informan, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perpustakaan tersebut mengalami transformasi signifikan dengan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Trenggalek serta pelaku UMKM, dalam merancang dan mengimplementasikan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.²²

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Aina Sabriyanti dan Abdul Karim Batubara pada tahun 2023 berjudul "Inklusi Sosial sebagai Transformasi Layanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Asahan" bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat pendidikan yang mendorong program-

²¹ Bulkisma Putri, "Evaluasi Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah", (Skripsi Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, 2022). Diakses melalui <http://repository.ilpus.ar-raniry.ac.id> pada 14 Februari 2024

²² Siti Nurul Kamidah, "Pengembangan Keterampilan Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pada Perpustakaan Lentera Desa Buluagung Karang Trenggalek", (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 2022), Vol. 7 No. 2. Diakses melalui <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jipi/article/view/12389> pada 21 Agustus 2024.

program perubahan guna menciptakan lapangan kerja dan mendukung kegiatan ekonomi daerah. Penelitian ini melibatkan 2 pustakawan sebagai informan, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Asahan berhasil mengembangkan layanan yang meningkatkan kemampuan individu untuk mempersiapkan diri dalam memperbaiki kondisi ekonomi mereka.²³

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Dinda Ayu Novianti, Ananda Dyah Ayu Kumala, Wahyu Enggar Wulandari, dan Ganis Chandra Puspitadewi dengan judul "Evaluasi Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pada Perpustakaan Umum Kota Batu Berdasarkan Model Evaluasi Kirkpatrick" mengkaji efektivitas layanan perpustakaan dalam meningkatkan literasi dan kreativitas masyarakat. Subjek penelitian terdiri dari pimpinan perpustakaan, staf, dan pustakawan, dengan total informan 6 orang. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, dan data sekunder dari berbagai sumber tertulis. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun fasilitas yang ada sudah memadai, pelaksanaan program inklusi sosial yang mencakup kegiatan seperti teknik *decoupage*, *cooking*, *English Club*, dan *e-Book* belum maksimal, sehingga belum sepenuhnya mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan beberapa informan hanya memanfaatkan program tersebut sebagai pengetahuan teoretis tanpa penerapan nyata.²⁴

²³ Aina Sabriyanti dan Abdul Karim Batubara, "Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Asahan", (Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi, 2023), Volume 4 No 3. Diakses melalui <http://journal.stmiki.ac.id/index.php/jimik/article/view/301> pada 21 Agustus 2024.

²⁴ Dinda Ayu Novianti, dkk, "Evaluasi Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pada Perpustakaan Umum Kota Batu Berdasarkan Model Evaluasi Kirkpatrick", (LibTech: Library

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Isna Thai Riyanda pada tahun 2020 berjudul "Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada Perpustakaan Desa Sekip Kabupaten Deli Serdang dalam Program Pemberdayaan Masyarakat" bertujuan untuk mengevaluasi pengembangan perpustakaan Desa Sekip dalam pemberdayaan masyarakat melalui transformasi berbasis inklusi sosial. Menggunakan metode kualitatif dengan 5 informan, teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa perpustakaan ini berkontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui akses informasi, pelatihan, dan pengembangan keterampilan, meskipun masih ada hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perpustakaan dan keterbatasan pengetahuan tentang pemanfaatan internet.²⁵

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Ghayatul Qurbi berjudul "Program Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat" dengan tujuan untuk mendeskripsikan proses pengadaan koleksi bahan pustaka yang berfokus pada kebutuhan informasi pengguna dan dampaknya di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendekatan berbasis kebutuhan pengguna

and Information Science Journal, 2023), Vol 4, No. 1. Diakses melalui DOI : 10.18860/libtech.v4i1.19798 pada 21 Agustus 2024.

²⁵ Isna Thai Riyanda "Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada peprustakaan Desa Sekip Kabupaten Deli Serdang Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat" (Skripsi Ilmu Perpustakaan dan Sains Teknologi, Fakultas Ilmu Budaya, 2020). Diakses melalui <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/25072> pada 21 Agustus 2024.

dimulai dengan pustakawan secara aktif berinteraksi dengan masyarakat untuk memahami minat dan kebutuhan informasi mereka.²⁶

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Fahmiya Azlin pada tahun 2022 berjudul "Evaluasi Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program perpustakaan berbasis inklusi sosial berdasarkan tiga indikator utama: konektivitas, konten, dan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, melibatkan tiga pustakawan dan dua pengelola taman baca masyarakat. Teknik analisis data dilakukan dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Padang Panjang telah terlaksana dengan baik dalam aspek konektivitas, pengolahan bahan bacaan sesuai standar konten, dan kebijakan sumber daya manusia, termasuk pelatihan teknis bagi pustakawan.²⁷

Adapun, penelitian yang ditulis oleh Afzazul Rahman, Muh. Quraisy Mathar, dan Indo Santalia yang berjudul "Analisis Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Meningkatkan Kecakapan Digital Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan", bertujuan untuk mengidentifikasi strategi

²⁶ Ghayatul Qurbi, "Program Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan Perpustakaan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat", (Skripsi Departemen Ilmu Informasi Dan Perpustakaan Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Padang, 2024), diakses melalui <http://repository.unp.ac.id/51451/> pada 21 Agustus 2024.

²⁷ Fahmiya Azlin, "Evaluasi Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang Panjang", (Skripsi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, 2022), diakses melalui <http://repository.unp.ac.id/42490/> pada 21 Agustus 2024.

Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam meningkatkan kecakapan digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan, menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan enam informan. Hasil penelitian mengidentifikasi lima strategi utama dalam implementasi program: penguatan sinergi *stakeholder*, peningkatan kemampuan, monitoring dan evaluasi, komunikasi publik, serta pengembangan sistem informasi manajemen. Namun, terdapat beberapa hambatan, seperti kelemahan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya evaluasi, dan belum adanya pengembangan sistem manajemen informasi.²⁸

Berdasarkan analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dan persamaan signifikan antara penelitian yang penulis lakukan dan studi-studi sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada objek, subjek, lokasi, dan waktu penelitian, serta fokus yang berbeda meskipun dalam lingkup perpustakaan berbasis inklusi sosial. Penelitian ini secara khusus menganalisis program inklusi sosial dengan menggunakan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023. Sementara itu, penelitian terdahulu cenderung mengidentifikasi kendala umum seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang tidak mencukupi, dan kurangnya dukungan masyarakat sebagai tantangan dalam pelaksanaan program inklusi sosial di perpustakaan. Dengan menggunakan peraturan terbaru sebagai dasar analisis, penelitian ini memberikan pendekatan baru

²⁸ Afzazul Rahman, dkk, “Analisis Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Meningkatkan Kecakapan Digital Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan”, (Journal Papyrus: Sosial, Humaniora, Perpustakaan dan Informasi, 2024), Vol. 3, No. 5. Diakses melalui <https://papyrusuim.id/index.php/jp/article/view/31> pada 21 Agustus 2024.

yang memungkinkan evaluasi lebih terperinci dan sesuai dengan pedoman regulasi terkini, serta menawarkan wawasan tambahan dan rekomendasi spesifik untuk meningkatkan implementasi program perpustakaan berbasis inklusi sosial.

B. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

1. Pengertian Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Menurut Marwiyah dikutip dari Dinda Ayu Novianti perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah upaya untuk membangun komunitas yang inklusif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial yang diselenggarakan di perpustakaan.²⁹ Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan institusi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui penyediaan berbagai layanan dan program yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang menyediakan fasilitas untuk masyarakat guna mengembangkan potensi mereka dan meningkatkan kualitas hidup. Perpustakaan juga memberikan dukungan kepada komunitas, orang dewasa, anak-anak, dan keluarga untuk belajar di lingkungan perpustakaan.³⁰

Perpustakaan berbasis inklusi sosial ialah sebuah institusi publik yang didesain untuk memfasilitasi pengembangan potensi individu dan masyarakat secara menyeluruh, dengan memberikan akses yang setara terhadap informasi,

²⁹ Dinda Ayu Novianti, dkk, “*Evaluasi Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pada Perpustakaan Umum Kota Batu Berdasarkan Model Evaluasi Kirkpatrick*”, (LibTech: Library and Information Science Journal, 2023), Vol 4, No. 1. Hal. 16. Diakses pada <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/libtech> 22 Februari 2024

³⁰ Woro Titi Haryanri, “*Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*”, (Talenta Publisher, 2019), Vol 2, No 3. Hal. 117. Diakses pada <https://talentaconfseries.usu.ac.id/lwsa/article/download/728/536/> 22 Februari 2024

sumber daya, dan berbagai program yang relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang beragam serta kesempatan untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat.³¹ Perpustakaan inklusif adalah perpustakaan yang tidak hanya menyediakan koleksi buku, tetapi juga menciptakan ruang yang nyaman dan interaktif bagi masyarakat untuk belajar, berkreasi, dan berinteraksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melibatkan mereka secara aktif dalam berbagai program dan kegiatan perpustakaan.³²

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami pengertian perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah sebuah perpustakaan yang dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang sering terpinggirkan. Selain menyediakan buku dan bahan bacaan, perpustakaan ini juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan program pendidikan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. perpustakaan bukan hanya menjadi tempat untuk mengakses informasi, tetapi juga menjadi tempat dimana individu dan komunitas dapat terlibat dalam pembelajaran yang berkelanjutan. Melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial, harapannya untuk menciptakan ruang terbuka yang ramah dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Perpustakaan berbasis inklusi sosial bukan hanya tempat untuk mengakses buku, tetapi juga menjadi pusat aktivitas dan pelayanan yang berfokus

³¹ Yesika Eva Tania, *Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat*, (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, 2023), Vol. 2 No. 1. Hal. 2.

³² Wiwit Widyawati, *Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial pada Rumah Baca Asma Nadia*, (Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, 2022), Vol. 4 No. 1. Hal. 30.

pada pemberdayaan masyarakat secara luas. Melalui pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, program-program perpustakaan seperti ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

2. Tujuan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Setiap organisasi memiliki tujuan tertentu, termasuk perpustakaan yang berfungsi sebagai lembaga sosial dengan tanggung jawab utama melayani masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perpustakaan berbasis inklusi sosial memiliki tujuan utama untuk meningkatkan literasi informasi yang berfokus pada teknologi serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyediaan akses ke sumber daya informasi yang moderen dan pelatihan dalam penggunaan teknologi digital, Perpustakaan ini berfungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Perpustakaan berbasis inklusi sosial juga mendukung pengembangan kemampuan individu dan memperkuat partisipasi sosial ekonomi masyarakat. Perpustakaan berbasis inklusi sosial dirancang untuk menjadi lebih dari sekadar tempat penyimpanan buku tetapi juga berfungsi sebagai pusat komunitas yang proaktif dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat, keterampilan digital, dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan mereka.³³

³³ Dinda Ayu Novianti, *Evaluasi Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pada Perpustakaan Umum Kota Batu Berdasarkan Model evaluasi Kirkpatrick*, (Jawa Timur : LibTech: Library and Information Science Journal, 2023), Vol. 4, No. 1. Hal. 16.

Menurut Suharyanto menyatakan bahwa tujuan perpustakaan berbasis inklusi sosial ada 3, yaitu:³⁴

Pertama, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan melalui perluasan akses, perbaikan koleksi, pengembangan layanan berbasis teknologi informasi, dan peningkatan kompetensi pustakawan. Penggunaan teknologi informasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan efektivitas layanan perpustakaan, memungkinkan inovasi dan pembaruan dalam berbagai kegiatan perpustakaan. Pemanfaatan teknologi dalam perpustakaan dapat memperluas jangkauan akses informasi, mengelola koleksi digital dengan lebih baik, dan menawarkan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.³⁵

Kedua, meningkatkan penggunaan layanan perpustakaan oleh masyarakat. Pelaksanaan program literasi informasi yang efektif, penyediaan ruang publik yang nyaman, dan penguatan peran perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan adalah langkah penting untuk mendukung pemberdayaan ekonomi. Program literasi informasi memainkan peran kunci dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan informasi secara efektif. Program ini dapat mencakup pelatihan, workshop, dan berbagai kegiatan lainnya yang dirancang untuk memperluas keterampilan literasi informasi

³⁴ Suharyanto, *Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, (Jurnal Pustakawan, 2020), Vol. 24, No. 2. Hal. 125.

³⁵ Runi Alcitra amalia, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Perpustakaan Digital Dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0", (Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019), diakses melalui <https://encr.pw/MjZ8N> pada 21 Agustus 2024.

masyarakat, sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya perpustakaan dengan lebih baik dan berdampak positif pada pengembangan ekonomi.³⁶

Ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung program inklusi sosial. Perpustakaan memerlukan upaya kolaboratif dengan menjalin kerja sama antara berbagai pihak, menyusun kebijakan yang sesuai, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perpustakaan, dan melakukan advokasi kepada para pemangku kepentingan. Kerja sama antar perpustakaan, seperti melalui layanan pinjam antar perpustakaan (silang layan), memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dengan memungkinkan pertukaran koleksi dan sumber daya informasi. Inisiatif ini tidak hanya memperluas akses informasi bagi pengguna tetapi juga memperkuat jaringan perpustakaan secara keseluruhan, menjadikan perpustakaan sebagai pusat pengetahuan yang lebih terhubung dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.³⁷

Adin Bondar mengemukakan bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai suatu lingkungan yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, tempat di mana mereka dapat berbagi pengalaman, melakukan pembelajaran kontekstual, serta mengembangkan keterampilan kerja guna meningkatkan kualitas hidup mereka.³⁸ Menurut Ningrum, perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan

³⁶ Desi Amalia Fadini, “Analisis Program Literasi Informasi Berdasarkan Standar Acrl Di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala”, (Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, 2022), diakses pada <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22666/> pada 21 Agustus 2024.

³⁷ Yunus, “Bentuk Kerjasama Layanan Perpustakaan”, (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur), Diakses melalui <https://acesse.dev/zf2Is> pada 21 Agustus 2024

³⁸ Adin Bondar, *Mobilisasi Pengetahuan Era Milenial Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*, (PPT Power Point, Hasil Seminar Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan 12 Desember 2019) diakses melalui <https://Perpustakaan.sari-mutiara.ac.id/> pada 22 Februari 2024

dalam mendukung budaya baca dan meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Selain itu, perpustakaan ini juga berupaya mendekatkan koleksi bahan bacaan dan sumber informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses dan memanfaatkan berbagai bahan pustaka yang tersedia. Tujuan ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca, memperluas wawasan, dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat bagi semua lapisan masyarakat.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah mendukung dan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi pada mereka dengan melakukan berbagai kegiatan pelibatan masyarakat untuk menunjang pembelajaran sepanjang hayat dengan harapan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat tanpa melihat dari suku, ras, agama, dan status sosial.

3. Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Setiap lembaga pasti mempunyai peran, begitu juga dengan perpustakaan mempunyai peran meningkatkan kualitas hidup dalam masyarakat dengan menyidakan berbagai informasi. Perpustakaan berbasis inklusi sosial berperan dalam membantu masyarakat mengembangkan dan menyalurkan hobi serta minat melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Kegiatan tersebut meliputi lomba menulis cerita, membaca cerita atau puisi, melukis atau mewarnai, dan berbagai aktivitas lainnya. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ini, diharapkan peserta

³⁹ Ningrum, *Kegiatan Inklusi Sosial di Perpustakaan Ganeshha SMA N 1 Jetis Bantul*, (UNILIB : Jurnal Perpustakaan, 2019), Vol. 10, No. 2. Hal. 126.

dapat mengembangkan bakat dan kreativitas mereka, yang nantinya bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁰

Perpustakaan berbasis inklusi sosial memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, yaitu:⁴¹

Pertama, perpustakaan harus berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi. Penyediaan koleksi informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan ini, perpustakaan perlu terus-menerus memperbaiki kualitas layanannya dengan mengadopsi standar pelayanan yang tinggi dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat. Selain itu, perpustakaan harus aktif dalam mendukung peningkatan literasi dengan menawarkan berbagai program edukatif dan pelatihan, serta berperan dalam memberdayakan komunitas di sekitarnya melalui penyediaan sumber daya yang mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Perpustakaan harus menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam mengembangkan potensi diri, yaitu tidak hanya sebagai tempat membaca dan meminjam buku, tetapi juga menyediakan layanan seperti makerspace, yang memberikan pengetahuan melalui pelatihan pembuatan produk.⁴²

⁴⁰ Iridayanti Kurniasih, *Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan di Perpustakaan Daerah Karanganyar*, (Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, 2021), Vol. 7, No. 2. Hal. 150.

⁴¹ *Ibid.* Hal. 151-152.

⁴² Melinda Putri. dkk, “Peran Perpustakaan Desa Dalam Program Literasi Berbasis Inklusi Sosial Di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis”, (Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara), Vol 9, No. 3. Hal 367-368.

Kedua, perpustakaan harus berfungsi sebagai pusat rujukan utama. Penyediaan koleksi informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk membantu pemustaka menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan. Pengembangan koleksi yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik masyarakat sangat penting, karena koleksi yang tepat dan relevan memudahkan akses masyarakat terhadap informasi yang diperlukan. Dengan menyediakan sumber daya yang dapat diandalkan dan langsung terkait dengan masalah yang dihadapi, perpustakaan dapat berperan lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat untuk mengatasi tantangan mereka secara mandiri dan informatif.⁴³

Ketiga, perpustakaan harus bertransformasi menjadi pusat kegiatan. Masyarakat berperan dalam pengembangan potensi diri, tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca dan meminjam buku, tetapi juga dengan menyediakan layanan inovatif seperti makerspace. Implementasi makerspace di perpustakaan memfasilitasi akses masyarakat terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak dimiliki secara pribadi, sehingga memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam kegiatan kolaboratif dan inovatif. Melalui makerspace, perpustakaan dapat menyediakan pelatihan praktis dalam pembuatan produk, yang tidak hanya memperkaya pengetahuan tetapi juga mengembangkan keterampilan kreatif dan

⁴³ Sugeng Wahyuntini, “Intensitas Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Bagi Prestasi Belajar Mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta”, (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2020), diakses melalui <http://digilib.isi.ac.id/8452/> pada 21 Agustus 2024.

teknis masyarakat, mendorong mereka untuk berinovasi dan menciptakan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁴

Keempat, perpustakaan harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi untuk memudahkan akses terhadap sumber daya informasi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau jauh dari lokasi perpustakaan. Dengan menggunakan teknologi informasi, perpustakaan dapat mengelola dan menyediakan koleksi digital yang dapat diakses dari mana saja, sehingga memungkinkan pemustaka untuk memperoleh informasi secara efektif tanpa harus secara fisik hadir di perpustakaan. Pendekatan ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan perpustakaan tetapi juga meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas informasi, serta mendukung upaya penyebaran pengetahuan yang lebih merata di seluruh komunitas.⁴⁵

Kelima, pustakawan harus berperan aktif sebagai mediator informasi. Pustakawan menjembatani antara masyarakat dan sumber informasi yang dibutuhkan, serta memainkan peran sentral dalam pelaksanaan program inklusi sosial di perpustakaan. Penting bagi pustakawan, terutama pustakawan referensi, untuk memiliki kompetensi khusus dalam menemukan, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara efektif dan bertanggung jawab. Kemampuan ini mencakup penerapan strategi pencarian informasi yang baik, baik yang tercetak

⁴⁴ Nihayati, “*Implementasi Makerspace dalam Layanan Perpustakaan*”; (Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan), Vol. 5, No. 2. Hal. 133-141.

⁴⁵ Ema Fatmawati Anidya, “*Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Perpustakaan Iain Tulungagung*”, (Jurnal Shaut Al-Maktabah, 2019). Vol. 11, No. 1. Hal. 7.

maupun online, guna memastikan bahwa pengguna mendapatkan akses yang optimal dan relevan terhadap informasi yang mereka perlukan.⁴⁶

Perpustakaan berbasis inklusi sosial berperan dalam menciptakan *knowledge society* dengan menyediakan literasi kepada masyarakat. Literasi ini tidak hanya terbatas pada kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga mencakup keterampilan kognitif. Keterampilan tersebut memungkinkan seseorang untuk berpikir kritis dan logis, serta memiliki kemampuan analisis yang baik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, potensi setiap individu dapat berkembang secara optimal dan berkualitas.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami peran perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah menyediakan fasilitas dan informasi untuk menjangkau semua lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan teknologi pada era digital saat ini sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia dengan menyediakan kebutuhan masyarakat yang relevan. Perpustakaan berbasis inklusi sosial tidak hanya menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga memberikan peluang bagi mereka untuk mengembangkan potensi intelektual serta menemukan inspirasi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

⁴⁶ Laila Rahmawati, “Peran Pustakawan Referensi Dalam Penelusuran Informasi Tercetak Dan Digital Di Perguruan Tinggi”, (Jurnal : Al-Maktabah, 2023), Vol. 2. Hal 13-14.

⁴⁷ Haryanto Haryanto, *Penerapan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Perguruan Tinggi Melalui Literasi Kewirausahaan Dan Entrepreneur Corner*, (Jurnal Ikatan Pustakawan Indonesia, 2020), Vol.5, No.1. Hal. 217–24, doi: <https://doi.org/10.1234/jurnal%20ipi.v5i1.49>.

C. Program Inklusi Sosial

Program perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu inisiatif yang secara substansial menggabungkan pengetahuan ilmiah, khususnya dalam bentuk ilmu terapan, yang kemudian diterapkan dalam berbagai kegiatan pelatihan yang dilaksanakan. Menurut Kaeding, keberhasilan suatu program perpustakaan inklusif sangat bergantung pada perencanaan yang matang. Beberapa aspek krusial yang perlu dipertimbangkan adalah aksesibilitas program bagi seluruh lapisan masyarakat, relevansi program dengan kebutuhan pengguna, serta keterlibatan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan program.⁴⁸

Mahdi memaparkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun perpustakaan umum yang fokus pada program inklusi sosial antara lain:

a) Kegiatan pemberdayaan masyarakat

Perpustakaan umum harus menyediakan berbagai kegiatan yang memberdayakan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, program literasi, dan kegiatan komunitas lainnya. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dengan memberdayakan masyarakat, perpustakaan dapat menjadi pusat pembelajaran

⁴⁸ Kaeding, *Public libraries and access for children with disabilities and their families: a proposed inclusive library model*, terjemahan. (Journal of the Australian Library and Information Association, 2017), Vol. 66, No. 2. Hal. 96-115. Diakses melalui <https://doi.org/10.1080/24750158.2017.1298399> pada 27 Februari 2024

dan pengembangan yang relevan dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.

b) Hak Akses Terhadap Layanan Perpustakaan

Setiap individu memiliki hak untuk mengakses layanan perpustakaan tanpa diskriminasi. Perpustakaan harus memastikan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan layanan yang disediakan. Ini termasuk menyediakan layanan yang ramah bagi kelompok-kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas.

c) Aksesibilitas Informasi Perpustakaan

Informasi yang ada di perpustakaan harus mudah diakses oleh semua pengunjung. Ini berarti perpustakaan perlu menyediakan berbagai format informasi, termasuk buku cetak, buku digital, audio, dan video, serta memanfaatkan teknologi untuk memperluas aksesibilitas. Selain itu, perpustakaan juga harus memastikan bahwa bangunan dan fasilitasnya mudah diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.⁴⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa program inklusi merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program inklusi sosial. Kegiatan yang dilakukan perpustakaan perlu kolaborasi dengan berbagai pihak supaya tercapai kesuksesan sehingga memberi dampak besar pada

⁴⁹ Reza Mahdi, "Pemberdayaan Masyarakat oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial," (Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2020), Vol. 19, No. 3. Hal. 255–263.

masyarakat luas. Program inklusi sosial juga perlu menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta untuk mengetahui lebih dalam kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan relevan. Maka oleh sebab itu perpustakaan harus kerjasama kepada semua pihak supaya tujuan dari suatu program berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat.

D. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023

Setiap organisasi atau institusi perlu ada pedoman bekerja agar berjalan dengan semestinya. Pentingnya peraturan setiap organisasi supaya terbentuk kedisiplinan dalam menjalankan suatu pekerjaan, begitu juga dengan perpustakaan harus ada peraturan agar menjadi pedoman dan arahan bagi pengelola perpustakaan. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023 dengan lampiran 15 halaman. Pada peraturan ini menjelaskan secara rinci mengenai konsep serta implementasi dari TPBIS dengan tujuan utama untuk memberikan klarifikasi yang jelas terhadap penggunaan istilah dan batasan terminologi yang digunakan dalam konteks transformasi tersebut. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dalam esensinya, adalah suatu upaya yang dirancang untuk mengembangkan dan mengoptimalkan peran serta fungsi perpustakaan dalam mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023 pasal 6, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial diselenggarakan dengan beberapa tahapan program, yaitu:⁵⁰

1. Seleksi Perpustakaan penerima program TPBIS

Tahapan seleksi perpustakaan penerima Program TPBIS melibatkan pemberitahuan kriteria oleh Perpustakaan Nasional kepada Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengajuan usulan calon penerima dari perpustakaan Kabupaten/Kota ke Provinsi dan kemudian ke Nasional untuk verifikasi. Kriteria penerima meliputi legalitas perpustakaan, pengelola tetap dengan struktur organisasi jelas, fasilitas ruangan dan listrik, lokasi dengan akses internet, dan komitmen menjalankan program berkelanjutan.

2. Sosialisasi Program Program TPBIS

Sosialisasi Program TPBIS dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan diikuti oleh perpustakaan Provinsi, perpustakaan Kabupaten/Kota, perpustakaan penerima program, serta pemangku kepentingan. Tujuan sosialisasi ini adalah agar semua orang paham betapa pentingnya program literasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan agar perpustakaan yang mengikuti program ini berkomitmen untuk melaksanakan program tersebut dengan baik.

3. Penetapan dan Pembekalan *Master Trainer*

Penetapan dan pembekalan *Master Trainer* ditetapkan oleh Perpustnas, untuk kelancara program pada perpustakaan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan

⁵⁰ Perpustakaan Nasional, *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241.

pegiat literasi. *Master Trainer* bertugas mengimplementasikan program, memberikan bimbingan teknis, melakukan mentoring, dan berpartisipasi dalam sosialisasi serta pertemuan pemangku kepentingan. Perpustakaan memberikan pembekalan kepada *Master Trainer* untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan analitik, kemampuan fasilitasi, serta komitmen peran dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan program.

4. Penetapan dan Pelatihan Fasilitator Daerah

Perpustakaan Nasional menetapkan Fasilitator Daerah dari unsur perpustakaan Kabupaten/Kota dan pegiat literasi, berdasarkan usulan dari perpustakaan Kabupaten/Kota. Fasilitator Daerah bertugas mengimplementasikan program, memfasilitasi bimbingan teknis, melakukan mentoring, serta mendokumentasikan dan mendorong penggunaan layanan perpustakaan. Mereka juga berperan dalam sosialisasi dan pertemuan pemangku kepentingan. Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan pendampingan dan pelatihan kepada Fasilitator Daerah, termasuk bimbingan teknis, strategi pelibatan masyarakat, komunikasi, monitoring, analisis, dan peningkatan kapasitas analitik.

5. Pertemuan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Meeting*)

Perpustakaan Nasional menyelenggarakan pertemuan dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional untuk memperkuat komitmen bersama. Pertemuan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep literasi untuk kesejahteraan serta transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Selain itu, pertemuan ini juga membahas kemajuan implementasi program di perpustakaan penerima, mendengarkan testimoni dari penerima

program, dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan lainnya terkait kebijakan serta alokasi sumber daya.

6. Pertemuan Pembelajaran Sebaya (*Peer Learning Meeting*)

Pertemuan pembelajaran sebaya (*peer learning meeting*) diadakan setiap tahun mulai dari tingkat provinsi hingga nasional untuk menunjukkan peran strategis perpustakaan dalam meningkatkan literasi dan kesejahteraan masyarakat. Pertemuan ini memfasilitasi pembelajaran dan berbagi pengalaman, menyampaikan capaian program, testimoni penerima, membahas topik relevan, serta mengadakan pameran produk usaha mikro hasil pembelajaran di Perpustakaan. Selain itu, apresiasi diberikan kepada perpustakaan berprestasi berdasarkan indikator yang telah diverifikasi.

7. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan analisis program dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan di berbagai tingkat, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dan kelurahan. Proses ini bertujuan untuk secara efektif memantau kemajuan dan pencapaian program, memberikan informasi yang diperlukan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan, serta membangun basis data yang akan mendukung bimbingan teknis dan pendampingan kepada perpustakaan penerima program. Dengan pendekatan ini, diharapkan program dapat diimplementasikan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.

8. Publikasi Program

Publikasi Program dilakukan oleh Perpusnas, perpustakaan Provinsi, perpustakaan Kabupaten/Kota, dan perpustakaan penerima program untuk

mengkomunikasikan, mempromosikan, dan mengadvokasi layanan serta kegiatan perpustakaan kepada masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang manfaat yang diberikan oleh perpustakaan dan program-programnya, serta untuk memastikan bahwa informasi tentang layanan tersebut tersebar luas dan dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam peraturan Kepala Perpunas No. 3 Tahun 2023 bagian keempat pasal 23 menjelaskan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yaitu:⁵¹

1) Menetapkan kebijakan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyusun dan menetapkan kebijakan lokal yang sejalan dengan kebijakan nasional untuk memastikan pelaksanaan transformasi perpustakaan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2) Melaksanakan sosialisasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menginformasikan dan mensosialisasikan program transformasi perpustakaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayahnya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi.

⁵¹ *Ibid*

3) Melakukan advokasi, koordinasi, supervisi, dan pendampingan dalam implementasi program di tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar dengan melakukan advokasi, koordinasi antar lembaga, supervisi pelaksanaan, serta memberikan pendampingan kepada pihak-pihak yang terlibat.

4) Membangun sinergi dengan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus membangun kerjasama dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan program transformasi perpustakaan.

5) Memfasilitasi pelaksanaan program di wilayah desa/kelurahan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan dan fasilitas yang diperlukan agar program transformasi perpustakaan dapat diimplementasikan dengan efektif di tingkat desa/kelurahan.

6) Melaksanakan perluasan dan replikasi program ke desa/kelurahan.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus memastikan bahwa program transformasi perpustakaan tidak hanya dilaksanakan di lokasi tertentu, tetapi juga diperluas dan direplikasi ke desa/kelurahan lain untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

7) Menjamin keberlanjutan pelaksanaan program di wilayah kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program transformasi perpustakaan dapat berjalan secara berkelanjutan dengan menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk jangka panjang.

Berdasarkan Penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa setiap organisasi termasuk perpustakaan memerlukan pedoman kerja agar berjalan dengan baik. Peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 3 Tahun 2023, yang mulai berlaku sejak 14 Maret 2023 menjelaskan tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Tujuan utama transformasi ini adalah agar perpustakaan bisa lebih baik dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Caranya adalah dengan memperkuat kemampuan Perpustakaan untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, meningkatkan kualitas layanan, mendorong masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan perpustakaan, dan meningkatkan literasi. Transformasi ini mencakup pengembangan program, tanggung jawab pemerintah, kerjasama dengan masyarakat, pembentukan tim kerja, dan pengelolaan dana. Semua ini dirancang agar Perpustakaan bisa lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan keadaan di lapangan dan bersifat alamiah.⁵² Pada penelitian kualitatif data dianalisis secara detail untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul, namun temuan yang dihasilkan lebih sering disajikan dalam bentuk naratif daripada melalui prosedur statistik, sehingga membantu kita memahami lebih baik tentang apa yang sedang diamati.⁵³

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang teratur untuk menganalisis program inklusi sosial di Dispersip Pidie. Tahap awal penulis melakukan *pre-elementary research* dengan mewawancarai pustakawan tentang perancangan dan penerapan program inklusi sosial di Dispersip Pidie. Penulis kemudian menelaah terhadap dokumen hasil pelaksanaan Program Inklusi Sosial yang terdokumentasi dalam media sosial resmi Dispersip Pidie. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang memungkinkan penulis untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam melalui wawancara dengan peserta program inklusi sosial. Analisis yang dilakukan difokuskan pada program yang telah direalisasikan, bertujuan untuk menganalisis sejauh mana program ini

⁵² Galang Surya Gumilang, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*, (Jurnal Fokus Konseling, 2016), diakses melalui <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>. pada 8 Maret 2024

⁵³ Umar Sidiq, Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Journal of Chemical Information and Modeling, 2019), vol. 53, diakses melalui <http://repository.iainponorogo.ac.id> diakses pada 8 Maret 2024

memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi program dalam memperkuat inklusi sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dispersip Pidie, yang beralamat Jln. Banda Aceh - Medan Km. 115, Sigli, Lampeude Tunong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24164. Pemilihan lokasi penelitian ini karena berdasarkan observasi, dan wawancara awal penulis mendapati beberapa masalah yang sebelumnya telah diuraikan dalam latar belakang masalah. Penulis memulai penelitian awal pada tanggal 16-19 Februari 2024, kemudian dilanjutkan pada tanggal 25-26 Juli 2024. Seluruh rangkaian penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 6 hari, yang mencakup pengumpulan data dan analisis dokumen.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan-batasan yang ditetapkan dalam penelitian untuk mengarahkan perhatian pada aspek-aspek tertentu dari fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian lapangan, sering kali terdapat banyak elemen terkait seperti lokasi, pelaku, dan aktivitas. Namun, tidak semua elemen tersebut dapat diteliti secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk menentukan batasan-batasan atau fokus penelitian agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efektif.⁵⁴

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Hal. 207.

Penelitian ini difokuskan pada analisis program inklusi sosial yang sudah dilakukan oleh Dispersip Pidie pada tahun 2023-2024, dengan merujuk pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih yang menjadi sumber data.⁵⁵ Subjek penelitian adalah entitas, individu, benda, maupun organisme, yang menjadi fokus pengumpulan data dan analisis dalam suatu penelitian. Subjek ini berperan penting dalam menyediakan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mencapai tujuan studi. Identifikasi dan pemilihan subjek penelitian yang tepat sangatlah krusial untuk memastikan validitas dan relevansi hasil penelitian yang dilakukan.⁵⁶ Istilah alternatif yang sering dipakai untuk merujuk kepada subjek penelitian adalah responden, yang mengacu pada individu yang memberikan tanggapan atau respons terhadap suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Selain itu, istilah responden atau subjek penelitian juga sering disebut sebagai informan, yang menggambarkan individu yang memberikan data atau informasi yang diminta oleh penulis terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.⁵⁷

Subjek penelitian ini melibatkan pustakawan Dispersip Pidie, yang terdiri dari dua (2) orang, lima (5) pengelola perpustakaan desa binaan, dan dua (2)

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hal. 246.

⁵⁶ Khairunisa, "Strategi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Literat (Studi Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi)." *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 4 No. 2, Desember 2020

⁵⁷ Sharif Hidayat, *Teori dan Prinsip Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 2008), Hal. 78.

pemustaka. Pemilihan lima informan pengelola perpustakaan karena perpustakaan desa binaan Dispersip Pidie ada tiga yakni perpustakaan desa Lancang, perpustakaan desa Dayah Tidek, perpustakaan Balee Rambong, perpustakaan desa Keutapang Bambong, dan Perpustakaan desa Reubat. Penulis memilih satu informan untuk mewakili setiap perpustakaan desa tersebut. Penulis juga memilih dua pemustaka untuk mendapatkan informasi mengenai epektifitas publikasi program yang telah diselenggarakan oleh Dispersip Pidie.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan keadaan dan sifat dari suatu benda, orang, atau sesuatu yang akan diteliti, objek penelitian itu sendiri merupakan sesuatu permasalahan dalam penelitian.⁵⁸ Objek dalam penelitian ini adalah program inklusi sosial yang sudah dilakukan oleh Dispersip Pidie.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah pertama dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik, baik berupa angka maupun deskripsi.⁵⁹ Pada pengumpulan data penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk interaksi verbal yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dari narasumber melalui serangkaian

⁵⁸ Yuliana Rakhmawati Surokim, *Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*, 2016, <https://komunikasi.trunojoyo.ac.id/> diakses pada 11 Maret 2024

⁵⁹ Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), Hal. 134.

pertanyaan.⁶⁰ Penelitian ini penulis melakukan tanya jawab secara lisan maupun tertulis kepada pustakawan Dispersip Pidie. Dalam studi ini, penulis menerapkan wawancara semi-terstruktur, yaitu teknik wawancara yang menggabungkan antara pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dengan pertanyaan spontan yang muncul selama interaksi dengan responden.⁶¹

Penulis melaksanakan wawancara langsung dengan 2 pustakawan yaitu Ibu Syarifah Faiza, S. Sos. dan Ibu Yurni, S.E., juga penulis mewawancarai 5 pengelola perpustakaan desa binaan Dispersip Pidie, dan penulis juga mewawancarai 2 pemustaka. Penulis menggunakan alat bantu seperti rekaman, buku catatan, dan kamera untuk memfasilitasi wawancara. Durasi wawancara dibatasi sekitar 7-10 menit per orang agar informan tidak merasa terlalu lama memberikan jawaban. Jika diperlukan, waktu wawancara diperpanjang untuk memastikan informasi yang diinginkan dapat terdokumentasi dengan baik.

Panduan wawancara dalam penelitian ini, disusun dengan maksud untuk pedoman atau tuntunan peneliti saat melakukan penelitian tentang Analisis Program Inklusi Sosial dengan Menggunakan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023 (Studi Kasus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie). Dalam panduan ini termuat pokok-pokok pertanyaan dan pengamatan beberapa aspek yang ingin diteliti.

⁶⁰ *Ibid*, Hal. 155

⁶¹ Wilinny, "Evaluasi Komunikasi Di PT. Asuransi Buana Independent Medan," (Jurnal Ilmiah Simantek, 2019), Vol. 3, No. 1. Hal 1–6.

**Tabel 3. 1 Indikator Penelitian Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustnas
No. 3 Tahun 2023 untuk wawancara pustakawan**

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN WAWANCARA
1	<p>Seleksi perpustakaan penerima program</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahapan seleksi dengan menggunakan kriteria perpustakaan penerima program meliputi legalitas, pengelola jelas, fasilitas memadai, serta berkomitmen menjalankan program. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apa saja kriteria dalam pemilihan perpustakaan penerima program inklusi sosial? 2) Bagaimana proses peyeleksian perpustakaan untuk menjadi penerima program yang dilakukan oleh Dispersip Pidie? 3) Perpustakaan mana saja yang sudah dilakukan penyeleksian dan berhasil menjadi perpustakaan penerima program?
2	<p>Sosialisasi program inklusi sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan sosialisasi program kepada pengelola perpustakaan penerima program agar mengimplementasikan di daerah masing-masing. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dispersip Pidie dalam rangka implementasi Program Inklusi Sosial? 2) Apa saja yang menjadi alasan yang mendasari perlunya pelaksanaan sosialisasi Program Inklusi Sosial oleh Dispersip Pidie?
3	<p>Penetapan dan Pembekalan Master Trainer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan para ahli supaya memberikan bimbingan teknis, melakukan mentoring, serta 	<ol style="list-style-type: none"> 3) Siapa saja yang berperan sebagai mentor bagi master trainer dalam program pembinaan perpustakaan yang dikelola oleh Dispersip Pidie, mengapa demikian?

	berpartisipasi dalam sosialisasi program inklusi sosial.	4) Bagaimana proses pelaksanaan mentoring terhadap pengelola perpustakaan binaan dalam rangka mendukung implementasi Program Inklusi Sosial?
4	<p>Penetapan dan Pelatihan Fasilitator Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan program TPBIS yang sudah dibekali dan ditetapkan oleh Perpunas di setiap daerah, serta memfasilitasi berbagai program inklusi sosial. 	<p>5) Bagaimana cara Dispersip Pidie dalam memfasilitasi pengembangan dan implementasi Program Inklusi Sosial?</p> <p>6) Jenis fasilitas apa saja yang dapat disediakan oleh Dispersip Pidie untuk mendukung pelaksanaan Program Inklusi Sosial?</p>
5	<p>Pertemuan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Meeting</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan membahas kemajuan program inklusi sosial untuk memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan. 	7) Bagaimana mekanisme dan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Dispersip Pidie dalam pertemuan dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terkait implementasi Program Inklusi Sosial?
6	<p>Pertemuan Pembelajaran Sebaya (<i>Peer Learning Meeting</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran bagi pengelola perpustakaan dalam penyampaian testimoni program, berbagi pengalaman, serta memamerkan produk dari 	8) Bagaimana agenda yang disusun dalam program pertemuan pemangku sebaya (<i>Peer Learning Meeting</i>)?

	karya masyarakat yang belajar melalui perpustakaan.	
7	<p>Monitoring dan evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses pengawasan program serta pemberian saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dalam membimbing pengelola perpustakaan penerima program. 	9) Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang diterapkan oleh Dispersip Pidie terhadap perpustakaan binaan yang menerima Program Inklusi Sosial?
8	<p>Publikasi program</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat program inklusi sosial serta menyebarluaskan informasi tentang TPBIS yang dapat diakses oleh publik. 	<p>10) Bagaimana cara Dispersip Pidie mempublikasikan program-program yang telah dilaksanakan?</p> <p>11) Apa saja tujuan yang ingin dicapai dari publikasi program melalui berbagai media?</p>

Tabel 3. 2 Indikator Penelitian Berdasarkan Peraturan Kepala Perpunas**No.3 Tahun 2023 untuk Wawancara Pengelola Perpustakaan Desa**

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN WAWANCARA
1	<p>Seleksi perpustakaan penerima program</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahapan seleksi dengan menggunakan kriteria perpustakaan penerima program meliputi legalitas, pengelola jelas, fasilitas memadai, serta berkomitmen menjalankan program. 	<p>1) Bagaimana proses penyeleksian yang dilakukan oleh Dispersip Pidie terhadap perpustakaan yang Bapak/Ibu kelola untuk menentukan kelayakan sebagai penerima program inklusi sosial?</p>
2	<p>Sosialisasi program inklusi sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan sosialisasi program kepada pengelola perpustakaan penerima program agar mengimplementasikan di daerah masing-masing. 	<p>1) Sosialisasi apa saja yang pernah bapak/ibu ikuti yang diselenggarakan oleh Dispersip Pidie?</p> <p>2) Bagaimana sosialisasi tersebut memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan keinginan bapak/ibu?</p>
3	<p>Penetapan dan Pembekalan (<i>Master Trainer</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan para ahli supaya memberikan bimbingan teknis, melakukan mentoring, serta berpartisipasi dalam sosialisasi program inklusi sosial. 	<p>3) Bagaimana proses mentoring yang dilakukan oleh master trainer terhadap bapak/ibu sebagai pengelola perpustakaan binaan Dispersip Pidie?</p>

4	<p>Penetapan dan Pelatihan Fasilitator Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan program TPBIS yang sudah dibekali dan ditetapkan oleh Perpunas di setiap daerah, serta memfasilitasi berbagai program inklusi sosial. 	<p>4) Bagaimana bapak/ibu pernah mengajukan permintaan fasilitas kepada Dispersip Pidie?</p> <p>5) Fasilitas apa saja yang pernah Bapak/ibu ajukan kepada Dispersip Pidie?</p>
5	<p>Pertemuan Pembelajaran Sebaya (<i>Peer Learning Meeting</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran bagi pengelola perpustakaan dalam penyampaian testimoni program, berbagi pengalaman, serta memamerkan produk dari karya masyarakat yang belajar melalui perpustakaan. 	<p>6) Bagaimana manfaat yang Bapak/Ibu rasakan dari penyelenggaraan <i>Peer Learning Meeting</i> oleh Dispersip Pidie?"</p>
6	<p>Monitoring dan evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses pengawasan program serta pemberian saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dalam membimbing pengelola perpustakaan penerima program. 	<p>7) Bagaimana proses bapak/ibu mengikuti monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dispersip Pidie?</p>
	<p>Publikasi program</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat program inklusi sosial serta 	<p>8) Dispersip Pidie mempromosikan program melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube.</p>

	menyebarkan informasi tentang TPBIS yang dapat diakses oleh publik.	Bagaimana cara bapak/ibu mengetahui kegiatan tersebut?
--	---	--

Daftar informan yang menjadi sumber data penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, baik tertulis maupun lisan, adalah sebagai berikut:

No	Informan	Kategori
1	Syarifah Faiza, S.Sos.	Pustakawan Dispersip Pidie
2	Yurni, S.E.	Pustakawan Dispersip Pidie
3	Tania Dieva Amalia Agustian	Pengelola Perpustakaan desa Dayah Tidek
4	Hasna Kamal	Pengelola Perpustakaan desa Balee Rastong
5	Sri Wulandari	Pengelola Perpustakaan desa Lancang
6	Junaidi	Pengelola Perpustakaan desa Reubat
7	Nur Afifah	Pengelola Perpustakaan desa Keutapang Bambong
8	Muhammad Rafi	Pemustaka Dispersip Pidie
9	Riska Saputri	Pemustaka Dispersip Pidie

Tabel 3. 3 Daftar Narasumber

Tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan mendalam tentang bagaimana perancangan dan pelaksanaan program inklusi sosial di Dispersip Pidie telah mengintegrasikan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023.

2. Telaah Dokumen

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis, baik itu dokumen resmi, catatan pribadi, atau publikasi media.⁶² Penulis menelaah dokumen yang sudah ada untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian, memungkinkan penulis untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan program inklusi sosial.

Adapun telaah dokumentasi dalam penelitian ini berfokus pada eksplorasi dokumen terkait program perpustakaan berbasis inklusi sosial yang terdapat di media sosial Dispersip Pidie. Penelitian melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap berbagai jenis konten seperti postingan, foto, dan video yang dipublikasikan oleh dinas tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana program inklusi sosial diintegrasikan dalam aktivitas sehari-hari perpustakaan dan bagaimana informasi ini disampaikan kepada masyarakat melalui platform media sosial.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data untuk memberikan nilai sosial, akademis, dan ilmiah pada suatu fenomena.⁶³ Tujuan utama analisis data adalah untuk membuat data lebih mudah dimengerti dan ditafsirkan.⁶⁴ Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data, yaitu:

⁶² Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hal. 231.

⁶³ Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), Hal. 191.

⁶⁴ Mohammad Kasiram, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: Alfabeta, 2008). Hal. 128.

1. Reduksi Data

Kegiatan reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data dilakukan sejak tahap pengumpulan data, dimulai dengan menyusun ringkasan, melakukan pengkodean, mencari tema, menulis memo, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan data atau informasi yang tidak relevan, dan kemudian data yang relevan diverifikasi.⁶⁵

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi semua informasi yang relevan. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan tujuan penelitian, khususnya program perpustakaan berbasis inklusi sosial menurut Peraturan Kepala Perpustnas No. 3 Tahun 2023. Data dipilih, diurutkan, dikelompokkan, dan diringkas sesuai kriteria yang ditetapkan. Informasi yang paling penting untuk menjawab pertanyaan penelitian menjadi prioritas. Hasil reduksi data yang telah diringkas akan memudahkan analisis lebih lanjut dan mendukung penarikan kesimpulan yang akurat terkait program inklusi sosial pada Dispersip Pidie.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menyusun kumpulan informasi secara sistematis sehingga dapat dianalisis dan diolah. Dalam penelitian kualitatif, narasi tertulis digunakan sebagai alat utama untuk menyajikan data, memungkinkan pembaca untuk memahami secara mendalam makna dan konteks dari informasi yang dikumpulkan. Ini dirancang

⁶⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 91-99

untuk memastikan bahwa informasi yang terkumpul dapat disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Penyajian naratif ini bertujuan mengintegrasikan berbagai data menjadi satu kesatuan yang padu, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami konteks dan isi dari data tersebut.⁶⁶

Dalam menyajikan data, penulis terlebih dahulu menulis teks deskriptif yang menjelaskan analisis program inklusi sosial di Dispersip Pidie. Teks ini mencerminkan hasil wawancara yang menunjukkan sejauh mana program inklusi sosial sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan No. 3 Tahun 2023. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang program inklusi sosial yang telah mengintegrasikan peraturan tersebut serta program yang belum mengikutinya.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses merumuskan makna dari data yang telah dianalisis. Hasil rumusan ini kemudian disajikan dalam bentuk kalimat deskriptif yang dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan mengenai temuan penelitian. Penelitian ini diakhiri dengan proses penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil reduksi dan penyajian data yang telah dianalisis. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan program inklusi sosial di Dispersip Pidie dengan mengacu pada pedoman yang tertuang dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

Tahap akhir penelitian penulis adalah penarikan kesimpulan, di mana penulis merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Seluruh tahapan tersebut kemudian penulis susun menjadi laporan akhir yang komprehensif, mencakup semua langkah penelitian dan referensi yang relevan. Tahapan ini memungkinkan penulis untuk menyajikan hasil analisis program inklusi sosial di Dispersip Pidie dengan jelas dan informatif.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Perpustakaan Dispersip Pidie

Pepustakaan Dispersip Pidie berdiri pada tahun 1983 dengan nama Perpustakaan daerah tk. II Pidie. Pada tahun 1990 berubah nama Tk. II Pidie. Kemudian pada tahun 2001 namanya berubah kembali menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pidie dengan Perda Kabupaten Pidie No. 24 tahun 2001 serta Qanun Kabupaten Pidie No. 5 tahun 2008 tentang tata organisasi perangkat Pidie. Sejak Februari 2017 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pidie berubah menjadi Dispersip Pidie sesuai dengan susunan tata kerja organisasi Kabupaten Pidie No. 19 Tahun 2017.⁶⁸

Sejak tahun 2022, Dispersip Pidie telah menjalankan Program Inklusi Sosial. Program ini fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan pelatihan dan sosialisasi di desa-desa di wilayah Pidie, dengan tujuan mencakup semua lapisan masyarakat. Program inklusi sosial yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat mencakup: Pelatihan tempat seserahan pengantin, Pelatihan hiasan dinding, Pelatihan digital marketing, Pelatihan merangkai daun sirih, pelatihan *public speaking* dan Pelatihan canva. Perluasan replikasi perpustakaan desa mandiri juga menjadi tugas bagi perpustakaan yang bertransformasi inklusi sosial, karena menjangkau seluruh masyarakat hingga ke

⁶⁸ Profil Dispersip Pidie, diakses melalui www.dispersip.pidie.kab.go.id/ pada 25 Juli 2024

desa demi mencapai kesejahteraan hidup. Perpustakaan yang telah berhasil replikasi mandiri yang dilakukan oleh Dispersip Pidie yakni perpustakaan desa Lancang, perpustakaan desa Dayah Tidek, perpustakaan Keutapang Bambong, perpustakaan desa Reubat dan perpustakaan desa Balee Rambong.

2. Visi dan Misi Dispersip Pidie

Visi:

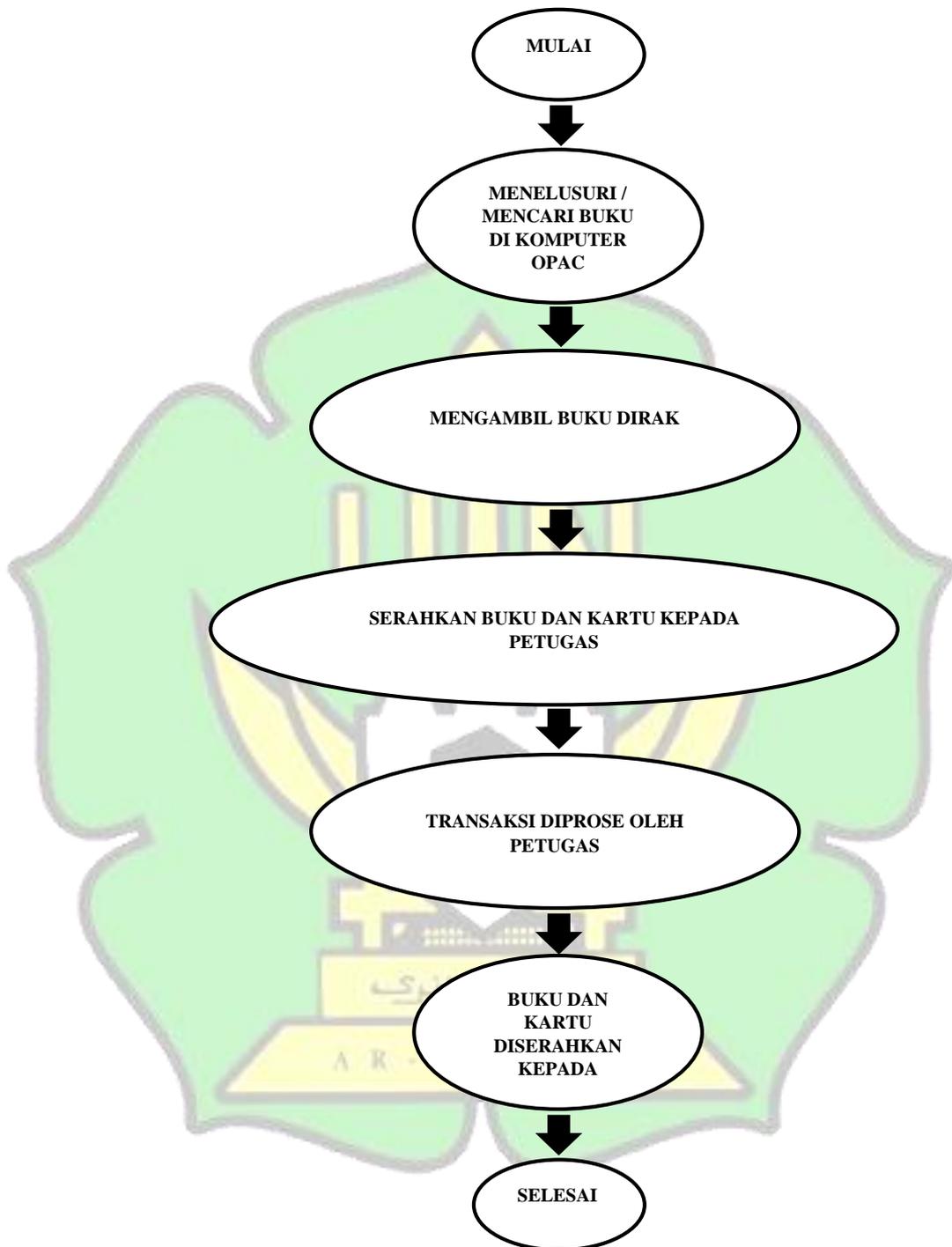
“Terwujudnya layanan Perpustakaan dan arsip yang prima sebagai pusat informasi, dokumentasi dan pembelajaran bagi masyarakat Pidie”.

Misi:

1. Mewujudkan minat baca masyarakat.
2. Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

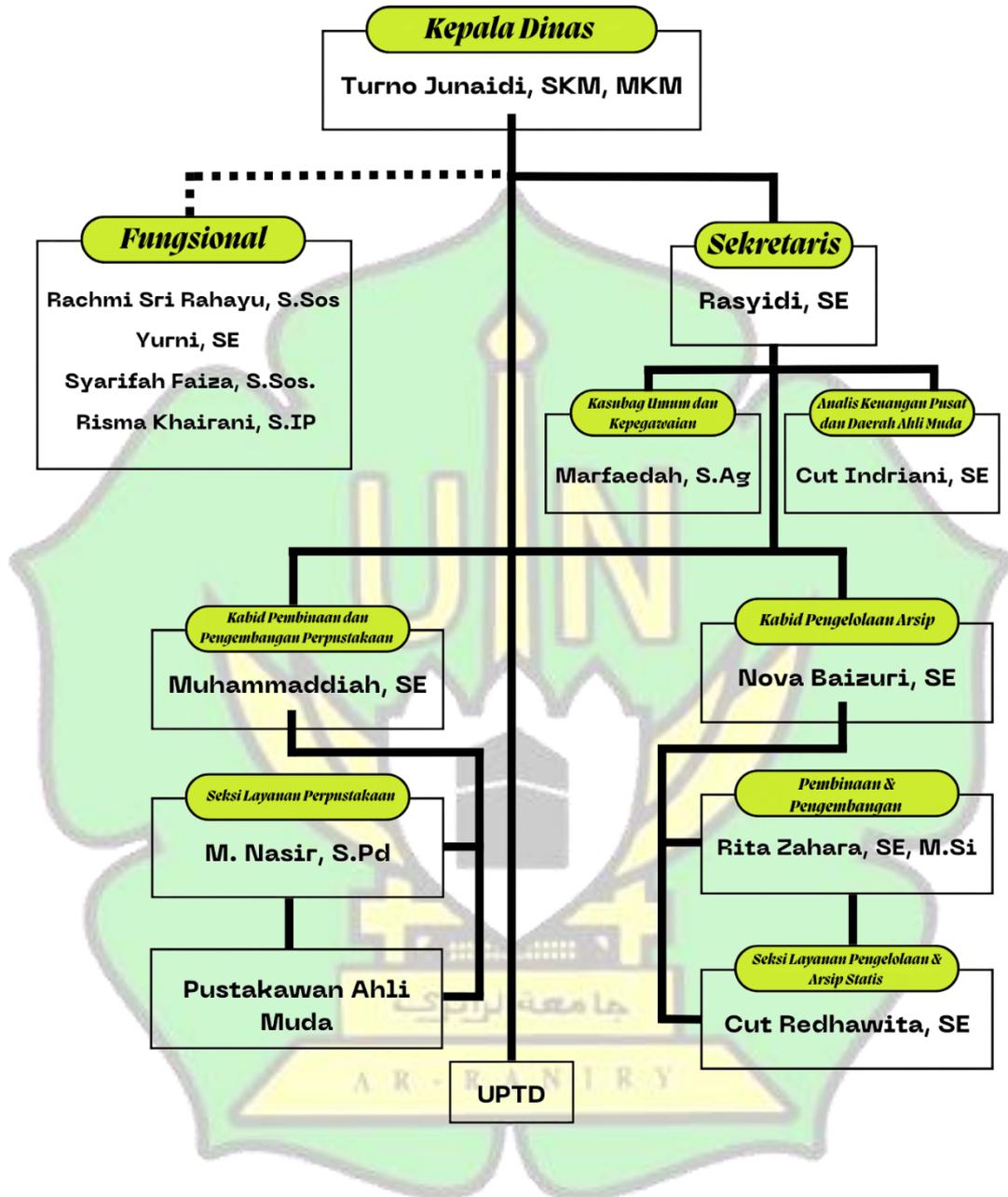


3. Alur Peminjaman Buku



Bagan 4. 1 Alur Peminjaman Buku

4. Struktur Perpustakaan



Bagan 4. 2 Struktur Perpustakaan

5. Fasilitas Perpustakaan

Berikut tabel fasilitas perpustakaan pada Dispersip Pidie.

No	Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Koleksi Buku	12.889	Judul
2	Kursi Baca	74	Unit
3	Meja Ruang Baca	15	Unit
4	Meja Sirkulasi	1	Unit
5	Komputer	8	Unit
6	Rak Buku	16	Unit
7	Loker Penitipan	30	Unit
8	Meja Sekat	5	Unit
9	Ac	8	Unit
10	Scaner	2	Unit
11	Televisi	3	Unit
12	Kamar Mandi	3	Ruang
13	Mushalla	1	Ruang

Tabel 4. 1 Fasilitas Perpustakaan

6. Layanan Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie menawarkan beragam layanan perpustakaan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Layanan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Layanan Sirkulasi

Layanan sirkulasi adalah kegiatan melayani pengguna perpustakaan dalam peminjaman dan pengembalian bahan pustaka beserta penyelesaian administrasinya.

Jam layanan : Senin – Jumat (pukul 08.00 WIB – 16.45 WIB)

Sabtu-Minggu libur.

Libur nasional Perpustakaan tutup.

b. Layanan Referensi

Layanan referensi merupakan layanan yang memberikan bantuan kepada pengguna dalam mencari informasi spesifik dengan memanfaatkan koleksi referensi perpustakaan.

c. Layanan Anak

Layanan anak adalah pelayanan perpustakaan yang ditujukan untuk anak, di dalamnya termasuk pengembangan koleksi anak muda, mendongeng, membantu pengejaran dan mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah.

d. Layanan Perpustakaan Keliling

Layanan perpustakaan keliling adalah kegiatan dimana karyawan perpustakaan menggunakan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain.

7. Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Pidie menyelenggarakan berbagai jenis layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Layanan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Layanan Program Pelibatan Masyarakat

Layanan program pelibatan masyarakat yaitu kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti pelatihan. Beberapa pelatihan yang telah dilakukan oleh Dispersip Pidie yaitu pelatihan public speaking, pelatihan merangkai daun sirih, pelatihan hiasan kain, pelatihan tempat mahar pengantin, pelatihan Canva, pelatihan hiasan dinding, dan pelatihan digital marketing.

b. Layanan Replikasi Perpustakaan Desa

Layanan replikasi perpustakaan desa yakni layanan yang ditujukan untuk memperluas program inklusi sosial ke perpustakaan desa. Kegiatan layanan replikasi perpustakaan desa meliputi; sosialisasi kepada pengelola perpustakaan desa, bimtek SPP-TIK, bahkan dilakukan monitoring dan analisis. Beberapa perpustakaan desa binaan Dispersip yaitu perpustakaan desa Lancang, perpustakaan desa Balee Rambong,

perpustakaan Dayah Tidek, perpustakaan Keutambang Bambong, dan perpustakaan desa Reubat.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Program Inklusi Sosial Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023 mencakup beberapa indikator, termasuk seleksi perpustakaan penerima program, sosialisasi program inklusi sosial, peran *master trainer*, fasilitator daerah, pertemuan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder meeting*), pertemuan pembelajaran sebaya (*peer learning meeting*), serta monitoring dan evaluasi. Implementasi program inklusi sosial oleh Dispersip Pidie berdasarkan peraturan ini mencakup aspek sebagai berikut:

a) Seleksi Perpustakaan Penerima Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan pustakawan Dispersip Pidie, terdapat ketentuan dalam menyeleksi perpustakaan desa yang menerima program inklusi sosial. Perpustakaan desa harus berkomitmen menjalankan program TPBIS, memasukkan kegiatan peningkatan literasi masyarakat dalam program desa, dan bersedia mengikuti keseluruhan program TPBIS. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Syarifah Faiza, S.Sos. bahwa:

*"Dasar pemilihan desa sebagai mitra program TPBIS meliputi kriteria berikut; desa tersebut sudah memiliki perpustakaan, menunjukkan komitmen untuk melaksanakan program TPBIS, memasukkan kegiatan peningkatan literasi masyarakat dalam program desa, dan bersedia mengikuti keseluruhan rangkaian program TPBIS."*⁶⁹

Selain itu, pustakawan lain juga menambahkan bahwa perpustakaan yang sudah sesuai kriteria penerima program akan diusulkan ke perpustakaan provinsi dan akan di verifikasi oleh Perpusnas, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yurni, S.E. yaitu :

*"Setelah kriteria pemilihan perpustakaan desa penerima program terpenuhi, Dispersip Pidie mengirimkan usulan perpustakaan calon penerima program yang memenuhi kriteria tersebut kepada perpustakaan Provinsi. Kemudian, usulan tersebut diteruskan ke Perpusnas untuk dilakukan verifikasi. Perpusnas kemudian menetapkan perpustakaan yang akan menerima program tersebut."*⁷⁰

Ibu Syarifah Faiza, S.Sos., menjelaskan bahwa perpustakaan desa yang telah menjadi mitra Dispersip Pidie terlibat dalam pelaksanaan program TPBIS, yaitu:

*"Perpustakaan desa yang menjadi mitra penerima program TPBIS yaitu perpustakaan desa Lancang, desa Keutapang Bambong, desa Reubat desa Balee Rambong, desa Dayah Tidek ."*⁷¹

⁶⁹ Wawancara pustakawan Dispersip Pidie : Ibu Syarifah Faiza, S.Sos., pada 25 Juli 2024, pukul 10:30-11:30 WIB.

⁷⁰ Wawancara pustakawan Dispersip Pidie : Ibu Yurni, S.E., pada 25 Juli 2024, pukul 10:30-11:30 WIB.

⁷¹ Wawancara pustakawan Dispersip Pidie : Ibu Syarifah Faiza, S.Sos., pada 25 Juli 2024, pukul 10:30-11:30 WIB.

Adapun pengelola perpustakaan desa Reubat menyampaikan proses penyeleksian yang dilakukan oleh Dispersip Pidie, seperti yang Bapak Junaidi katakan, bahwa:

“Desa Reubat termasuk salah satu perpustakaan desa penerima program TPBIS di kabupaten Pidie, pengelola perpustakaan desa Reubat sudah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.”⁷²

Selanjutnya, Ibu Nur Afifah selaku pengelola perpustakaan desa Keutapang Bambong menjelaskan persiapan perpustakaan desa untuk menerima program TPBIS, mengatakan:

“Bantuan dan bimbingan dari pustakawan Dispersip Pidie, perpustakaan desa Keutapang Bambong kini telah berhasil menerima program TPBIS.”⁷³

Dari pemaparan pustakawan dan pengelola perpustakaan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Dispersip Pidie sudah melaksanakan seleksi terhadap perpustakaan desa calon penerima program TPBIS dengan mengacu pada kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perpustnas. Hal ini sesuai dengan yang tertera pada pasal 7 dan pasal 8 ayat a, b, c, d, dan e dalam peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023.

⁷² Wawancara pengelola Perpustakaan desa Reubat: Bapak Junaidi, pada 28 Juli 2024, pukul 14:00-14:30 WIB.

⁷³ Wawancara pengelola Perpustakaan desa Keutapang Bambong : Ibu Nur Afifah, pada 30 Juli 2024, pukul 10:00-10:30 WIB.

b) Sosialisasi Program Inklusi Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan pustakawan Dispersip Pidie, Ibu Yurni, S.E. menjelaskan bentuk sosialisasi program inklusi sosial yang diselenggarakan oleh Dispersip Pidie:

*"Sosialisasi program TPBIS dilakukan melalui beberapa bentuk, yaitu sosialisasi daring dan luring, bimbingan teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPP-TIK), dan sosialisasi talkshow literasi."*⁷⁴

Adapun, pengelola perpustakaan desa yang dibina oleh Dispersip Pidie mengikuti sosialisasi untuk pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Ibu Sri Wulandari menyatakan telah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dispersip Pidie.

*"Sosialisasi yang telah diikuti, seperti program TPBIS dan talkshow literasi, adalah langkah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam kegiatan literasi yang penting bagi masyarakat."*⁷⁵

Selanjutnya, Ibu Tania Dieva Amalia Agustian sebagai pengelola perpustakaan desa Dayah Tidek mengatakan pernah mengikuti sosialisasi bimbingan teknis, beliau menuturkan :

"Telah mengikuti sosialisasi bimbingan teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPP-TIK) yang diselenggarakan oleh Dispersip Pidie, khusus bagi pengelola perpustakaan desa binaan, sebagai bagian dari upaya untuk

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Wawancara pengelola Perpustakaan desa Lancang : Ibu Sri Wulandari, pada 30 Juli 2024, pukul 10:00-10:30 WIB.

meningkatkan kemampuan dan kualitas layanan perpustakaan di tingkat desa.."⁷⁶

Penulis menemukan bahwa sudah diselenggarakan sosialisasi program untuk mengubah perpustakaan menjadi lebih dari sekadar tempat penyimpanan buku. Dengan kata lain perpustakaan menjadi ruang publik yang berfungsi untuk mengembangkan keterampilan hidup melalui koleksi ilmu terapan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Yurni.

S.E. yaitu :

*"Alasan dilakukannya sosialisasi program untuk meningkatkan kualitas pengelola perpustakaan desa agar bisa mengubah pandangan masyarakat tentang perpustakaan, bukan hanya sebagai tempat menyimpan buku. Sosialisasi ini juga bertujuan supaya program inklusi sosial lebih dikenal luas oleh masyarakat."*⁷⁷

Setelah mengikuti sosialisasi Ibu Nur Afifah selaku pengelola Perpustakaan desa Keutapang Bambong menjelaskan manfaat yang didapat dan berupaya untuk menerapkan pada perpustakaan yang dikelolanya :

*"Sosialisasi sangat bermanfaat dan berguna untuk keberlangsungan program inklusi sosial pada perpustakaan desa sehingga masyarakat lebih aktif ke perpustakaan."*⁷⁸

⁷⁶ Wawancara pengelola Perpustakaan desa Dayah Tidek: Ibu Tania Dieva Amalia Agustian, pada 28 Juli 2024, pukul 14:00-14:30 WIB.

⁷⁷ Wawancara pustakawan Dispersip Pidie : Ibu Yurni, S.E., pada 25 Juli 2024, pukul 10:30-11:30 WIB.

⁷⁸ Wawancara pengelola Perpustakaan desa Keutapang Bambong : Ibu Nur Afifah, pada 30 Juli 2024, pukul 10:00-10:30 WIB.

Keterangan hampir sama yang disampaikan oleh pengelola perpustakaan desa Reubat yakni Bapak Junaidi mengungkapkan manfaat setelah mengikuti sosialisasi Bimtek SPP-TIK bahwa :

*" Sosialisasi Bimtek SPP-TIK sangat membantu dalam menjalankan program inklusi sosial di perpustakaan desa yang dikelola, karena memberikan pencerahan dan panduan yang jelas."*⁷⁹

Menurut keterangan yang disampaikan oleh pengelola perpustakaan desa binaan Dispersip Pidie, sosialisasi yang diselenggarakan sejalan dengan kebutuhan dan keinginan para pengelola perpustakaan desa. Sosialisasi yang diadakan oleh Dispersip Pidie relevan dan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan para pengelola perpustakaan desa. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 3 peraturan Kepala Perpustnas Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi membangun komitmen dari perpustakaan penerima program untuk mengimplementasikan tahapan dan strategi program.

c) ***Master Trainer***

Berdasarkan hasil wawancara, tugas *master trainer* adalah melakukan implementasi program dan melakukan mentoring pasca bimbingan teknis. Proses pelaksanaan mentoring yang dilakukan oleh Dispersip Pidie terhadap pengelola perpustakaan desa dalam rangka mendukung implementasi program inklusi sosial dengan membangun

⁷⁹ Wawancara pengelola Perpustakaan desa Reubat: Bapak Junaidi, pada 28 Juli 2024, pukul 14:00-14:30 WIB.

komunikasi membuat grup *WhatsApp* kemudian memantau kinerja melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM). Sebagaimana yang Ibu Yurni, S.E sampaikan yaitu :

*"Proses mentoring bagi perpustakaan binaan Dispersip Pidie melibatkan beberapa langkah kunci: mengawal Rencana Kerja masing-masing perpustakaan, melakukan kunjungan berkala, membuat grup WhatsApp untuk komunikasi antara pengelola perpustakaan, serta memantau capaian kinerja melalui SIM dan skor KPI (Key Performance Indicator)."*⁸⁰

Bapak Jufriadi menyatakan bahwa *mentoring* oleh Dispersip Pidie dilakukan dengan mendatangi langsung perpustakaan desa untuk memeriksa kinerja pengelola perpustakaan kadangkala juga ada *dimentoring* melalui grup *WhatsApp*.

*"Dispersip Pidie telah melaksanakan program mentoring, dimana pustakawan mengunjungi perpustakaan desa untuk memberikan bimbingan langsung. Selain itu, mentoring juga dilakukan melalui grup WhatsApp untuk memastikan dukungan yang berkelanjutan."*⁸¹

Keterangan yang serupa dikatakan oleh Ibu Sri Wulandari sebagai pengelola perpustakaan desa Lancang bahwa :

*"Mentoring yang dilakukan oleh Dispersip Pidie mencakup kunjungan langsung ke perpustakaan desa. Namun, apabila terdapat kendala yang memerlukan penanganan segera, konsultasi sering kali dilakukan melalui telepon dengan Ibu Yurni sebagai mentor."*⁸²

⁸⁰ Wawancara pustakawan Dispersip Pidie : Ibu Yurni, S.E., pada 25 Juli 2024, pukul 10:30-11:30 WIB.

⁸¹ Wawancara pengelola Perpustakaan desa Reubat : Bapak Jufriadi, pada 28 Juli 2024, pukul 14:00-14:30 WIB.

⁸² Wawancara pengelola Perpustakaan desa Lancang : Ibu Sri Wulandari, pada 30 Juli 2024, pukul 10:00-10:30 WIB.

Berdasarkan penuturan pengelola perpustakaan desa dan pustakawan Dispersip Pidie, penulis menyimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau ketidaksesuaian antara keduanya. Proses mentoring yang dilakukan oleh mentor Dispersip Pidie terhadap pengelola perpustakaan telah berjalan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan pasal 10 ayat 3 pada peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 3 Tahun 2023 bahwa melakukan mentoring kepada pengelola Perpustakaan binaan pasca bimtek (SPP-TIK).

d) Fasilitator daerah

Berdasarkan wawancara dengan pustakawan Dispersip Pidie, Ibu Yurni, S.E. menjelaskan berbagai hal yang dapat difasilitasi oleh Dispersip Pidie :

“Pendampingan terhadap perpustakaan binaan meliputi pelaksanaan program, peningkatan kapasitas pengelola, serta pemberian bimbingan setelah sosialisasi dan bimbingan teknis. Selain itu, berbagi pengalaman juga kepada seluruh perpustakaan desa binaan.”⁸³

Adapun, perpustakaan desa Dayah Tidek meminta fasilitas berupa pendampingan dari Dispersip Pidie dalam kegiatan sosialisasi program TPBIS di perpustakaan desa. Pengelola perpustakaan desa Dayah Tidek adalah Ibu Tania Dieva Amalia Agustian mengatakan bahwa :

⁸³ Wawancara pustakawan Dispersip Pidie : Ibu Yurni, S.E., pada 25 Juli 2024, pukul 10:30-11:30 WIB.

"Meminta pendampingan Dispersip Pidie dalam kegiatan sosialisasi program TPBIS kepada masyarakat di perpustakaan desa."⁸⁴

Selain itu, pengelola perpustakaan desa Balee Rastong menyatakan bahwa mereka belum pernah mengajukan permintaan fasilitas secara langsung. Namun, justru Dispersip Pidie yang meminta mereka untuk mengajukan permintaan fasilitas kepada Perpunas dengan bantuan dari Dispersip Pidie. Seperti Ibu Hasna Kamal jelaskan bahwa :

"Fasilitas belum pernah diminta secara langsung kepada Dispersip Pidie. Permintaan fasilitas perpustakaan desa diajukan melalui Dispersip Pidie kepada Perpunas. Baru-baru ini, rak buku diterima dari Perpunas berkat bantuan Dispersip Pidie."⁸⁵

Berdasarkan pernyataan pengelola perpustakaan desa binaan di atas, Dispersip Pidie menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini terlihat dari konsistensi antara ungkapan pustakawan dan pengelola perpustakaan desa mengenai penyediaan fasilitas, serta mekanisme pengajuan permintaan fasilitas yang diterapkan oleh Dispersip Pidie. Hal ini sesuai dengan peraturan Kepala Perpunas Nomor 3 Tahun 2023 pasal 12 ayat 3 (b) dan yang berbunyi memfasilitasi bimtek SPP-TIK untuk Perpustakaan replikasi mandiri di daerah.

⁸⁴ Wawancara pengelola Perpustakaan desa Dayah Tidek: Ibu Tania Dieva Amalia Agustian, pada 28 Juli 2024, pukul 14:00-14:30 WIB.

⁸⁵ Wawancara pengelola Perpustakaan desa Balee Rastong : Ibu Hasna Kamal, pada 28 Juli 2024, pukul 14:00-14:30 WIB.

e) **Pertemuan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Meeting*)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pustakawan Dispersip Pidie, pertemuan dengan pemangku kepentingan dilakukan melalui kolaborasi berbagai institusi, bekerja sama memanfaatkan peluang untuk menciptakan program yang meningkatkan literasi dan memberdayakan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Ibu Syarifah Faiza, S.Sos. yaitu:

"Dispersip Pidie menjalin kemitraan melalui komitmen para pemimpin pemangku kepentingan dan memanfaatkan peluang kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas cakupan program literasi dan memberdayakan masyarakat secara lebih efektif."⁸⁶

Ibu Yurni, S.E. juga menambahkan, bahwa :

"Melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai institusi seperti Bappeda Pidie, DPMG Kab. Pidie, Bunda Literasi Pidie, Kantor Pajak Sigli, Unigha, Puskesmas, dan pegiat literasi untuk memperkuat program dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat."⁸⁷

Berdasarkan penjelasan dari pustakawan, Dispersip Pidie menyelenggarakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustnas No. 3 Tahun 2023 pasal 15 ayat 2, yang menyatakan bahwa perlu mendapatkan dukungan dari

⁸⁶ Wawancara pustakawan Dispersip Pidie : Ibu Syarifah Faiza, S.Sos., pada 25 Juli 2024, pukul 10:30-11:30 WIB.

⁸⁷ Wawancara pustakawan Dispersip Pidie : Ibu Yurni, S.E., pada 25 Juli 2024, pukul 10:30-11:30 WIB.

pemangku kepentingan lainnya, khususnya terkait kebijakan dan alokasi sumber daya untuk keberlanjutan pelaksanaan program.

f) **Pertemuan Pembelajaran Sebaya (*Peer Learning Meeting*)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pustakawan, *peer learning meeting* diadakan sekali setahun untuk menyampaikan keberhasilan program sekaligus testimoni, serta menjadi ajang pameran produk dan karya masyarakat yang belajar dari perpustakaan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Syarifah Faiza, S.Sos. yaitu :

“Peer learning meeting diadakan setahun sekali untuk berbagi pengalaman antar perpustakaan penerima program TPBIS. Kegiatan ini juga jadi ajang pameran produk dan karya masyarakat sebagai testimoni dari pencapaian program inklusi sosial.”⁸⁸

Adapun perpustakaan desa binaan yang mengikuti *peer learning meeting* mengatakan saat pertemuan berlangsung, pustakawan dan pengelola perpustakaan desa saling bertukar pikiran dalam hal pelaksanaan program inklusi sosial dan juga memamerkan karya masyarakat yang mengikuti program inklusi sosial. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Ibu Hasna Kamal, yaitu:

“Acara peer learning meeting yang diselenggarakan oleh Dispersip Pidie, banyak sekali manfaatnya karena saling bertukar pikiran tentang penerapan program inklusi sosial kemudian masing-masing perpustakaan

⁸⁸ Wawancara pustakawan Dispersip Pidie : Ibu Syarifah Faiza, S.Sos., pada 25 Juli 2024, pukul 10:30-11:30 WIB.

desa memamerkan produk hasil masyarakat yang sudah belajar dari perpustakaan.”⁸⁹

Kemudian, pengelola perpustakaan desa Lancang juga mengikuti *peer learning meeting*, Ibu Sri Wulandari menuturkan :

“Saling berbagi ilmu dan pengalaman tentang program pelibatan masyarakat, serta menampilkan karya dan produk dari capaian masyarakat yang telah mengikuti berbagai pelatihan, merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas program tersebut.”⁹⁰

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa agenda pertemuan pembelajaran sebaya (*peer learning meeting*) berfungsi sebagai forum diskusi antara pustakawan dan pengelola perpustakaan mengenai pelaksanaan program TPBIS, serta sebagai ajang pameran produk hasil capaian masyarakat yang telah berpartisipasi dalam program yang diselenggarakan oleh perpustakaan. Hal ini sesuai dengan pasal 16 ayat 3 dan 5 yang berbunyi *peer learning meeting* memfasilitasi proses belajar, berbagi pengalaman, dan penyelenggaraan pameran produk-produk hasil dari masyarakat yang belajar di perpustakaan.

⁸⁹ Wawancara pengelola Perpustakaan desa Balee Rastong : Ibu Hasna Kamal, pada 28 Juli 2024, pukul 14:00-14:30 WIB.

⁹⁰ Wawancara pengelola Perpustakaan desa Lancang : Ibu Sri Wulandari, pada 30 Juli 2024, pukul 10:00-10:30 WIB.

g) **Monitoring dan Evaluasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pustakawan, proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dispersip Pidie terlebih dahulu membangun komunikasi secara berkala sehingga koordinasi lebih cepat dan efisien. Pernyataan diatas seperti yang dituturkan oleh Ibu Yurni, S.E., bahwa :

"Melakukan kunjungan berkala ke perpustakaan binaan untuk memastikan implementasi program berjalan dengan baik. Selain itu, dibuat grup WhatsApp yang beranggotakan semua pengelola perpustakaan binaan untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi, serta berbagi informasi secara cepat dan efisien."⁹¹

Pengelola perpustakaan desa binaan menyebutkan bahwa Dispersip Pidie melakukan monitoring melalui grup *WhatsApp*. Namun, evaluasi cuma dilakukan oleh Dispersip Pidie dalam waktu tertentu saja. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hasna Kamal yakni :

"Monitoring berjalan dengan efektif melalui grup WhatsApp, dan pada waktu tertentu juga dilakukan evaluasi."⁹²

Selanjutnya, Ibu Sri Wulandari menyampaikan keterangan serupa bahwa pustakawan melakukan monitoring dan analisis dengan membentuk grup *WhatsApp* untuk mempermudah komunikasi. Namun, evaluasi biasanya dilakukan melalui kunjungan pustakawan

⁹¹ Wawancara pustakawan Dispersip Pidie : Ibu Yurni, S.E., pada 25 Juli 2024, pukul 10:30-11:30 WIB.

⁹² Wawancara pengelola Perpustakaan desa Balee Rastong : Ibu Hasna Kamal, pada 28 Juli 2024, pukul 14:00-14:30 WIB.

Dispersip Pidie ke perpustakaan desa atau dengan mengundang pengelola perpustakaan desa ke Dispersip Pidie.

"Monitoring dilakukan melalui grup WhatsApp yang disediakan oleh pustakawan Dispersip Pidie. Evaluasi dilakukan secara langsung, baik melalui kunjungan pustakawan Dispersip Pidie ke perpustakaan desa, maupun dengan mengundang pengelola perpustakaan ke Dispersip Pidie."⁹³

Adapun pernyataan dari Ibu Tania Dieva Amalia Agustian hampir sama dengan Ibu Sri Wulandari, Ia menuturkan bahwa :

"Pustakawan Dispersip Pidie biasanya melakukan pemantauan secara langsung ke perpustakaan desa. Selain itu, pengelola perpustakaan kadang-kadang diundang untuk menghadiri sesi pemantauan dan evaluasi di Dispersip Pidie."⁹⁴

Berdasarkan keterangan dari pengelola perpustakaan desa binaan Dispersip Pidie, penulis menyimpulkan bahwa proses monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Dispersip Pidie. Keterangan yang diberikan tidak saling bertentangan, menunjukkan bahwa kedua proses tersebut berjalan dengan efektif. Hal ini sejalan dengan peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 3 Tahun 2023 pasal 18 ayat a,b, dan c memantau perkembangan dan pencapaian program, sebagai sumber informasi bagi peningkatan kualitas pelaksanaan program, serta menjadi basis data dalam

⁹³ Wawancara pengelola Perpustakaan desa Lancang : Ibu Sri Wulandari, pada 30 Juli 2024, pukul 10:00-10:30 WIB.

⁹⁴ Wawancara pengelola Perpustakaan desa Dayah Tidek: Ibu Tania Dieva Amalia Agustian, pada 28 Juli 2024, pukul 14:00-14:30 WIB.

melakukan bimtek dan pendampingan bagi perpustakaan penerima program.

h) Publikasi Program

Berdasarkan wawancara dengan pustakawan Dispersip Pidie, publikasi program dilakukan melalui media sosial seperti platform Instagram dan Facebook. Pernyataan Ibu Syarifah Faiza, S.Sos., sebagai pustakawan yaitu:

“Dokumentasi kegiatan dipublikasikan melalui media sosial Dispersip Pidie, seperti Instagram dan Facebook untuk mempermudah akses publik terhadap informasi dan perkembangan program.”⁹⁵

Selanjutnya, Ibu Yurni, S.E., menambahkan tentang publikasi dokumentasi kegiatan merupakan salah satu sarana promosi bagi Dispersip Pidie:

“Publikasi dokumentasi program di media sosial berfungsi sebagai sarana promosi perpustakaan TPBIS, memungkinkan informasi dan perkembangan program dapat diakses oleh seluruh masyarakat Pidie.”⁹⁶

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan pemustaka untuk menganalisis dampak dari publikasi program melalui media sosial Dispersip Pidie. Hasil wawancara Pak Muhammad Rafi mengatakan:

⁹⁵ Wawancara pustakawan Dispersip Pidie : Ibu Syarifah Faiza, S.Sos., pada 25 Juli 2024, pukul 10:30-11:30 WIB.

⁹⁶ Wawancara pustakawan Dispersip Pidie : Ibu Yurni, S.E., pada 25 Juli 2024, pukul 10:30-11:30 WIB.

“Meskipun sudah mengikuti akun Instagram Dispersip Pidie, pemustaka jarang mengakses platform tersebut membuat kurang mengetahui aktivitas yang telah dilakukan.”⁹⁷

Selanjutnya, pemustaka lain juga mengatakan hal yang serupa, seperti yang dituturkan Buk Riska Saputri, yaitu:

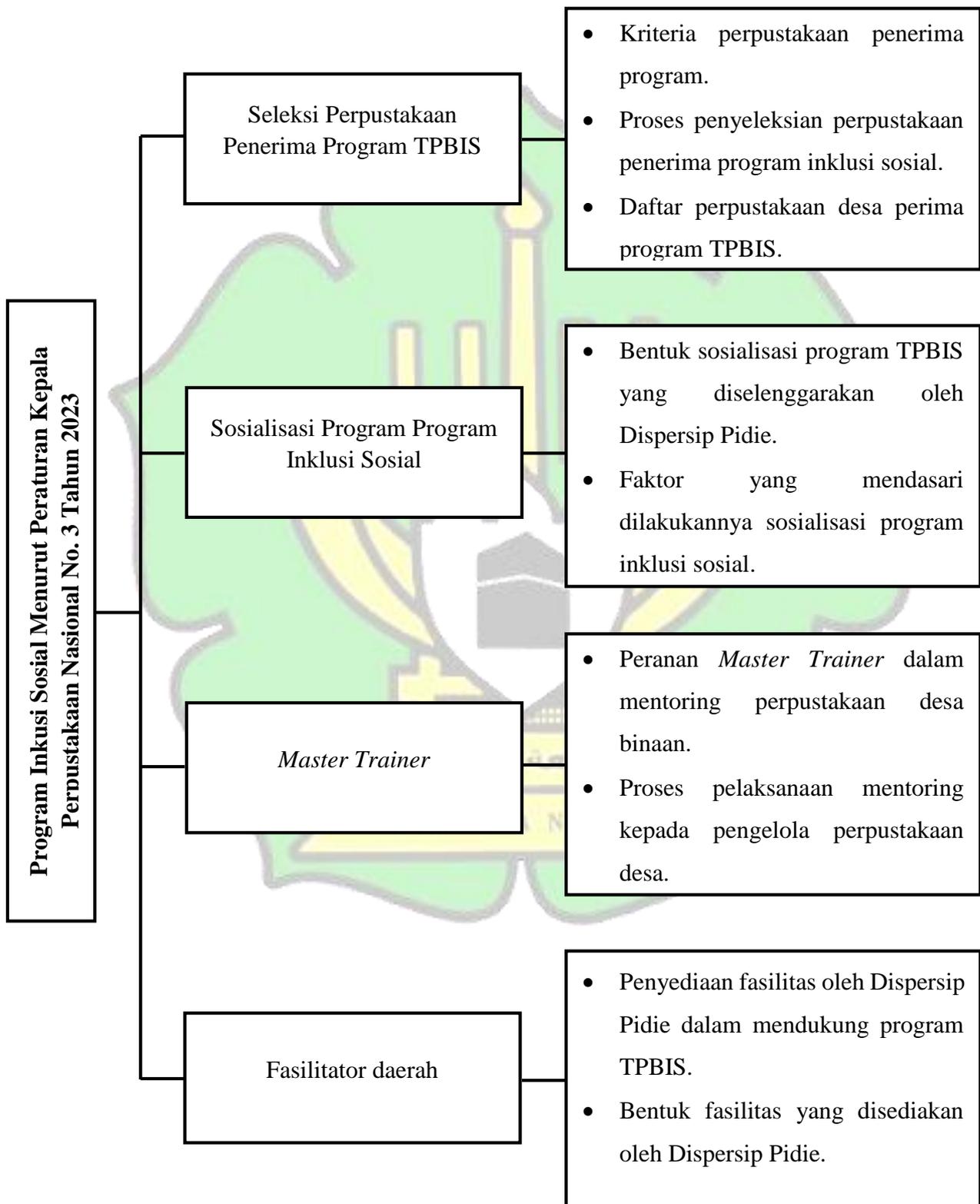
“Meskipun Dispersip Pidie memiliki akun Instagram, pemustaka masih sulit untuk mendapatkan pembaruan atau perkembangan terbaru mengenai aktivitas yang diselenggarakan oleh Dispersip Pidie.”⁹⁸

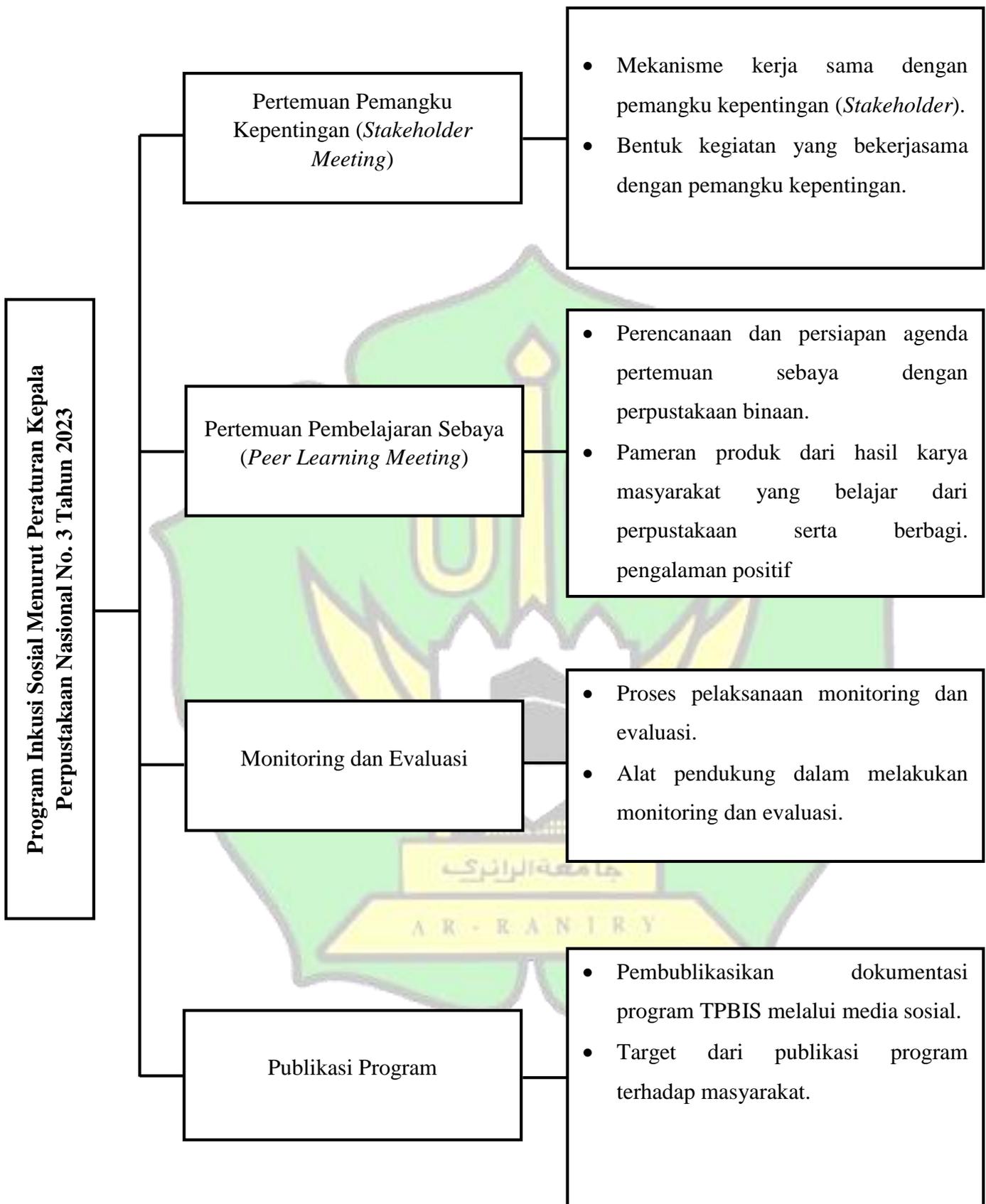
Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tujuan Dispersip Pidie dalam publikasi program adalah untuk mempromosikan kegiatan kepada masyarakat luas. Namun, pernyataan dari pemustaka menunjukkan adanya ketidaktahuan mengenai kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Dispersip Pidie. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam komunikasi publikasi, sesuai dengan peraturan Kepala Perpusnas Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 19 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa publikasi harus mengkomunikasikan, mempromosikan, dan melakukan advokasi tentang layanan serta kegiatan perpustakaan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

⁹⁷ Wawancara pemustaka Dispersip Pidie : Bapak Muhammad Rafi, pada 30 Juli 2024, pukul 11:00-11:15 WIB.

⁹⁸ Wawancara pemustaka Dispersip Pidie : Buk Riska Saputri, pada 30 Juli 2024, pukul 11:20-11:30 WIB.

Bagan 4. 3 Hasil Penelitian Mengenai Program Inklusi Sosial Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023





C. Pembahasan

Upaya implementasi program inklusi sosial yang dilakukan oleh Dispersip Pidie yang merujuk pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023, merupakan bagian dari penyelenggaraan TPBIS yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya adalah menjadikan perpustakaan inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan potensi kesejahteraan hidup. Program pelibatan masyarakat bertujuan untuk menarik minat masyarakat terhadap perpustakaan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui penyediaan pelatihan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, agar pemustaka lebih aktif dalam mengunjungi perpustakaan. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan, serta memperkuat peran perpustakaan sebagai pembelajaran sepanjang hayat.

Merujuk pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 3 Tahun 2023 pasal 8, perpustakaan yang berhak menerima program TPBIS harus memenuhi kriteria seperti legalitas pendirian perpustakaan, memiliki pengelola tetap dan struktur organisasi yang jelas, memiliki ruangan dan jaringan listrik, terjangkau oleh internet, serta berkomitmen menjalankan program secara berkelanjutan. Dispersip Pidie menerapkan kriteria ini dalam menyeleksi perpustakaan desa calon penerima program. Setelah memenuhi kriteria, perpustakaan desa diusulkan ke perpustakaan provinsi untuk diverifikasi oleh Perpustakaan Nasional. Dispersip Pidie berhasil mengajukan 5 perpustakaan desa sebagai penerima program TPBIS, yaitu Perpustakaan desa

Lancang, Perpustakaan desa Dayah Tidek, Perpustakaan desa Balee Rambong, Perpustakaan desa Reubat, dan Perpustakaan desa Keutapang Bambong.

Adapun sosialisasi program yang diselenggarakan oleh Dispersip Pidie bertujuan untuk mengembangkan potensi pengelola perpustakaan desa binaan dalam melaksanakan program inklusi sosial. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dispersip Pidie disesuaikan dengan kebutuhan pengelola perpustakaan desa binaan, seperti Bimbingan Teknis SPP-TIK wajib diikuti oleh seluruh pengelola perpustakaan desa binaan. Selain itu, berbagai pelatihan juga diadakan untuk meningkatkan kemampuan pengelola agar program inklusi sosial dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di desa. Sosialisasi ini berfungsi sebagai wadah bagi pengelola perpustakaan desa yang ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola perpustakaan berbasis inklusi sosial. Berikut ini dokumentasi sosialisasi program yang diselenggarakan oleh Dispersip Pidie:



Gambar 4. 1 Bimtek SPP-TIK



Gambar 4. 2 Talk Show

Dari telaah dokumentasi, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi program Dispersip Pidie kurang peserta tanpa kerjasama dengan pemangku kepentingan. Misalnya, pelatihan bimtek SPP-TIK hanya diikuti delapan peserta. Namun, dengan

advokasi dan kerjasama, seperti dalam Talk Show yang melibatkan Bappeda Pidie dan institusi pemerintah lainnya, jumlah peserta meningkat hingga 100 orang. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 3 pada peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 3 Tahun 2023 menjelaskan bahwa membangun komitmen dari perpustakaan penerima program untuk mengimplementasikan strategi program dan memberikan pemahaman kepada pengelola perpustakaan akan tujuan yang ingin dicapai.

Setelah mengikuti sosialisasi dan pelatihan dari Dispersip Pidie, pengelola perpustakaan desa perlu mentoring dari *master trainer* yang difasilitasi oleh Perpustakaan. Mentoring dilakukan melalui kunjungan ke perpustakaan dalam jangka waktu tertentu untuk pemantauan langsung, komunikasi cepat melalui grup *WhatsApp*, dan pemantauan sistematis menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM). Ini sesuai dengan pasal 10 ayat 3 yang mengatur tugas *master trainer* dalam mentoring pengelola perpustakaan desa untuk program TPBIS.

Selanjutnya, dalam pasal 12 ayat 3(c) dalam peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 3 Tahun 2023 menyebutkan fasilitator daerah melakukan implementasi program peningkatan layanan informasi, program pelibatan masyarakat, dan advokasi. Maka Dispersip Pidie memfasilitasi berbagai institusi, pegiat literasi, dan perpustakaan desa dalam pengembangan program inklusi sosial. Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan peningkatan literasi masyarakat dapat mengajukan permintaan fasilitas kepada Dispersip Pidie. Bentuk fasilitas yang diberikan kepada institusi, pegiat literasi, dan perpustakaan desa meliputi bantuan yang dapat difasilitasi oleh Dispersip Pidie, seperti penyediaan narasumber untuk sosialisasi, penyediaan berbagai koleksi perpustakaan, dan penyediaan tempat di Dispersip

Pidie. Selain itu, Dispersip Pidie juga mendukung program-program literasi dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pengelola perpustakaan desa serta pegiat literasi.

Selain itu, membangun komitmen bersama pemangku kepentingan (*stakeholder*) bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai literasi untuk kesejahteraan dan program TPBIS kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 dalam peraturan Kepala Perpustnas Nomor 3 Tahun 2023. Oleh hal itu, Dispersip Pidie menerapkan strategi dengan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti Bappeda Pidie, Kantor Pajak, dan Bunda Literasi. Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan memastikan keberlanjutan program TPBIS, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Berikut dokumentasi kegiatan pertemuan pemangku kepentingan yang dilakukan oleh Dispersip Pidie:



Gambar 4. 3 *Stakeholder Meeting*

Dari telaah dokumentasi diatas, terlihat bahwa 26 peserta mengikuti pertemuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Dispersip Pidie melakukan advokasi

secara serius dan terstruktur untuk mengembangkan literasi masyarakat dan memperkenalkan perpustakaan TPBIS.

Kemudian, Pertemuan pembelajaran sebaya atau *peer learning meeting* merupakan program tahunan yang diadakan sekali dalam setahun. Program ini dirancang sebagai forum bagi pustakawan dan para pengelola perpustakaan desa penerima program TPBIS untuk bertemu, berdiskusi, dan saling berbagi pengalaman tentang penyelenggaraan program inklusi sosial. Selain itu, pertemuan tahunan ini juga menjadi ajang pameran bagi setiap perpustakaan desa yang menampilkan produk dan karya hasil dari berbagai kegiatan yang diikuti oleh masyarakat setempat. Produk dan karya tersebut merupakan bukti nyata dari dampak positif program-program yang diselenggarakan oleh perpustakaan desa dalam meningkatkan literasi dan memberdayakan masyarakat. Berikut ini dokumentasi proses pelaksanaan kegiatan *peer learning meeting*:



Gambar 4. 4 *Peer Learning Meeting*

Dari telaah dokumen, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan *Peer Learning Meeting* diikuti oleh 8 peserta dari perpustakaan desa binaan. Pertemuan

ini bertujuan untuk menyampaikan capaian program perpustakaan desa sekaligus memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang telah belajar dari perpustakaan.

Selanjutnya, monitoring oleh Dispersip Pidie dilakukan dengan melibatkan pengelola perpustakaan desa melalui sosialisasi, pelatihan, dan komunikasi berkelanjutan. Monitoring dilakukan secara langsung melalui kunjungan berkala pustakawan untuk evaluasi dan bimbingan, serta secara tidak langsung melalui komunikasi rutin di grup WhatsApp. Pendekatan ini memastikan bahwa monitoring dan evaluasi berjalan efektif, sehingga program perpustakaan desa dapat dilaksanakan sesuai arahan. Hal ini sejalan yang tertera pada pasal 18 ayat a dan b dalam peraturan Kepala Perpusnas Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi memantau perkembangan dan pencapaian Program dan sebagai sumber informasi bagi peningkatan kualitas pelaksanaan Program di perpustakaan.

Tahap akhir dari seluruh program adalah mempublikasikan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dispersip Pidie dan perpustakaan desa, dengan tujuan untuk memperkenalkan perpustakaan inklusi sosial kepada masyarakat luas. Publikasi ini dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Langkah ini sejalan dengan pasal 19 ayat 2 Peraturan Kepala Perpusnas Nomor 3 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa publikasi program adalah upaya untuk mengkomunikasikan, mempromosikan, dan mengadvokasi layanan serta kegiatan perpustakaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, tujuan dari publikasi program oleh Dispersip Pidie belum sepenuhnya tercapai, karena masih terdapat kekurangan dalam hal penyampaian informasi kepada pemustaka. Banyak

pemustaka yang belum mengetahui secara jelas mengenai penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dispersip Pidie.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie sudah melakukan program inklusi sosial sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023. Hal tersebut diketahui melalui seleksi perpustakaan penerima, sosialisasi program, penetapan dan pembekalan master trainer, penetapan dan pelatihan fasilitator daerah, pertemuan dengan pemangku kepentingan, pertemuan pembelajaran sebaya, kegiatan monitoring serta evaluasi, dan publikasi program. Namun, program inklusi sosial masih kurang sambutan dari masyarakat dan dukungan dari pemangku kepentingan belum sepenuhnya maksimal dalam mendukung program inklusi sosial.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dapat menghasilkan:

- a. Bagi pihak Dispersip Pidie, agar program tetap berkelanjutan, perlu memperkuat monitoring dan evaluasi untuk memastikan perkembangan dan pencapaian sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023.
- b. Bagi peraturan Kepala Perpusnas Nomor 3 Tahun 2023, agar sosialisasi program berjalan optimal, sebaiknya ditetapkan jangka waktu pelaksanaan agar lebih efektif.

- c. Bagi pustakawan, agar publikasi program mencapai target yang diharapkan, maka perlu ditingkatkan efisiensinya supaya informasi tentang kegiatan perpustakaan dapat lebih menjangkau dan diinformasikan secara efektif kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Afzazul, Rahman, and Muh. Quraisy. "Analisis Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Meningkatkan Kecakapan Digital Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan." *Journal Papyrus: Sosial, Humaniora, Perpustakaan dan Informasi* Vol. 3, No. 5, 2022.
- Aina, Sabriyanti, and Karim, Batubara dan Abdul. "Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Asahan." *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi* Vol. 4, No. 3, 2023.
- Arikunto. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bondar, Adin. "Mobilisasi Pengetahuan Era Milenial Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial." *Universitas Sari Mutiara Indonesia* (Universitas Sari Mutiara Indonesia), 2019.
- Diana. "Dampak Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Penelitian Pada Perpustakaan Desa Simpang Utama Kabupaten Bener Meriah)." *UIN Ar-Raniry*, 2022.
- Dinda, Ayu, Novianti. "Evaluasi Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pada Perpustakaan Umum Kota Batu Berdasarkan Model Evaluasi Kirkpatrick." *LibTech: Library and Information Science Journal* Vol 4, No. 1, 2023.
- Dwi, Aprilia. "Efektivitas Program “Perpuseru” dalam mengembangkan Perpustakaan Berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Lubuklinggau." 2019.
- Ema, Fatmawati, Anidya. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Perpustakaan Iain Tulungagung." *Jurnal Shaut Al-Maktabah* Vol. 11, no. No. 1, 2019.
- Fahmiya, Azlin. "Evaluasi Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang Panjang." *Skripsi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang*, 2022.
- Fandi, Rahman, Hidayat. "Pemanfaatan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Sesuai dengan Tujuan Program SDGs Indonesia 2030." *Media Pustakawan* Vol. 29, No.3, 2022.

- Galang, Surya, Gumilang. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling." *Jurnal Fokus Konseling*, 2016.
- Haryanri, Woro Titi. "Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial." *Talenta Publisher* Vo 2. No 3, 2019.
- Haryanto, Haryanto. "Penerapan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Perguruan Tinggi Melalui Literasi Kewirausahaan Dan Entrepreneur Corne." *Jurnal Ikatan Pustakawan Indonesia* Vol. 5, No.1, 2020.
- Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, 2006.
- Imam, Suprayoga, dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Iridayanti, Kurniasih. "Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan di Perpustakaan Daerah Karanganyar." *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* Vol. 7, No. 2, 2021.
- Isna, Thai, Riyanda. "Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada peprustakaan Desa Sekip Kabupaten Deli Serdang Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat." *Skripsi Ilmu Perpustakaan dan Sains Teknologi, Fakultas Ilmu Budaya*, 2020.
- Kaeding. "Public libraries and access for children with disabilities and their families: a proposed inclusive library model." *Journal of the Australian Library and Information Association* Vol. 66, No. 2, 2017.
- Khairunisa. "Strategi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Literat (Studi Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi)." *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* Vol. 4, No. 2, 2020.
- Kurniasih, Iridayanti. " Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan di Perpustakaan Daerah Karanganyar." *Lentera Pustaka*, 2021.
- Laila, Rahmawati. "Peran Pustakawan Referensi Dalam Penelusuran Informasi Tercetak Dan Digital Di Perguruan Tinggi." *Al-Maktabah* Vol. 2, 2023.
- Maghfiroh. "Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7, No. 01, 2021.
- Mahdi, Reza. "Pemberdayaan Masyarakat oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 2020.
- Mohammad, Kasiram. *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: Alfabeta, 2008.

- Muhaimin, Suti'ah, dan Listyo, Prabowo Sugeng. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ningrum. "Kegiatan Inklusi Sosial di Perpustakaan Ganesha SMA N 1 Jetis Bantul." *UNILIB : Jurnal Perpustakaan* Vol. 10, No. 2, 2019.
- Novianti, Dinda Ayu. "Evaluasi Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pada Perpustakaan Umum Kota Batu Berdasarkan Model Evaluasi Kirkpatrick." *Library and Information Science Journal*, 2023.
- Perpustakaan Nasional. "Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023." *Perpustakaan Nasional*. Jakarta, 2023.
- Prima, Putra, Gutama Budi, dan Widiyahseno Bambang. "Inklusi sosial dalam pembangunan desa." *Reoformasi*, 2020.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi oktober 2023." *Balai Pustaka*. Jakarta, 2015.
- Putri, Bulkisma. "Evaluasi Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah." *UIN Ar-Raniry*, 2022.
- Putri, Melinda. "Peran Perpustakaan Desa Dalam Program Literasi Berbasis Inklusi Sosial Di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis." *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol. 9, No. 3 : 367-368.
- Ra'is, Dekki Umamur. "Peta Inklusi Sosial Dalam Regulasi Desa." *Reformasi* Vol 7. No 2, 2017.
- Rasyid, Muhammad. "Perspektif Islam Tentang Evaluasi Pendidikan." *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI* Vol 14 No. 25, 2016.
- Reza, Mahdi. "Pemberdayaan Masyarakat oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* Vol. 19, No. 3, 2020.
- Runi, Alcitra, amalia. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Perpustakaan Digital Dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0." *Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, 2019.
- Sharif, Hidayat. *Teori dan Prinsip Pendidikan*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Sitti, Faoziyah. "Inklusi Sosial Dalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Untuk Semua." *Akselerasi* Vol 5. No 1, 2023.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

- Suharyanto. "Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial: Konsep dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Pustakawan*, 2020.
- Tania, Yesika ,Eva. "Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat." *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam* Vol. 2, No. 1, 2023.
- Umar, Sidiq, dan Choiri Miftachul. "Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan." *Journal of Chemical Information and Modeling* Vol. 53, No. 1, 2019.
- Wartiningsih. " Evaluasi Kirckpatrick's Pelatihan Pengelolaan Kampung Keluarga Berencana." *SELAPARANG* Vol 4. No 2 , 2021.
- Widyawati, Wiwit. "Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial pada Rumah Baca Asma Nadia." *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* Vol. 4, No. 1, 2022.
- Yuliana, Rakhmawati, Surokim. *Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*. Bangkalan, Jawa Timur: Universitas Trunojoyo Madura, 2016.
- Yuni, Septiani, Aribbe Edo, and Diansyah Risnal. "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru)." *Jurnal Teknologi Dan Open Source* Vol. 3, No. 1, 2020.
- Zhaochun, dan Qunqing. "Reaching out to vulnerable groups in China: a broad library with social inclusion." *IFLA Journal* Vol. 34, Edisi. 1, 2008.



Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi (SK) Lama



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 51/Un.08/FAH/KP.004/01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran ujian skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh di pandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut;
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.**
- Kesatu : Menunjuk saudara :
1). Dr. Zubaidah, S.Ag., M.Ed. (Pembimbing Pertama)
2). Asnawi, S.IP., M.I.P. (Pembimbing kedua)
Untuk membimbing Skripsi mahasiswa
Nama : Khalis Anwar
Nim : 190503056
Prodi : Ilmu Perpustakaan (IP)
Judul : Evaluasi Program Inklusi Sosial dengan Menggunakan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023 (Studi Kasus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie)
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebahgalmana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 12 Januari 2024

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
4. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
5. Arsip

Dekan,


Syarifuddin

Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi (SK) Terbaru, Setelah Perubahan Judul



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 51/Un.08/FAH/KP.004/01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran ujian skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh di pandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut;
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.

Kesatu : Menunjuk saudara :
1). Dr. Zubaidah, M.Ed. (Pembimbing Pertama)
2). Asnawi, S.IP.,M.I.P. (Pembimbing kedua)

Untuk membimbing Skripsi mahasiswa

Nama : Khalis Anwar

Nim : 190503056

Prodi : Ilmu Perpustakaan (IP)

Judul : Analisis Program Inklusi Sosial dengan Menggunakan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun Tahun 2023 (Studi Kasus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 12 Januari 2024

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
4. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
5. Arsip

Dekan

Syakfuddin

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pidie



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 841/Un.08/FAH.I/PP.00.9/05/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Khalis Anwar / 190503056**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Perpustakaan
Alamat sekarang : Tibang, Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Evaluasi Program Inklusi Sosial dengan Menggunakan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023 (Studi Kasus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Mei 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Agustus
2024

Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S., Ph.D

AR-RANIRY

Lampiran 4 : Surat telah Melaksanakan Penelitian Dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jln. Banda Aceh-Medan Km.115 Tjue Sigli Kode Pos 24151
Website : dispersip.pidiekab.go.id

Sigli, 27 Juni 2024 M
20 Muharram 1446 H

Nomor : 180 / DPKD / 2024
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Ar- Raniry

di-

Tempat

- Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar- Raniry Banda Aceh Nomor 841/Un.08/FAH.I/PP.00.9/05/2024, tanggal 03 Juni 2024 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
- Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami menerangkan bahwa :
Nama/NIM : **Khalis Anwar / 190503056**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Perpustakaan
Alamat Sekarang : Tibang, Syiah Kuala, Banda Aceh
- Kami tidak keberatan memberi izin untuk melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul: "*Evaluasi Program Inklusi Sosial dengan Menggunakan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023 (Studi Kasus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie)*".
- Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN PIDIE**

DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN

TURNO JUNAIDI, SKM, MKM
Nip. 197102011994031007

Lampiran 5 : Lembar Pertanyaan Wawancara

PANDUAN WAWANCARA

Panduan ini disusun dengan maksud untuk pedoman atau tuntunan peneliti saat melakukan penelitian tentang Analisis Program Inklusi Sosial dengan Menggunakan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023 (Studi Kasus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie). Dalam panduan ini termuat pokok-pokok pertanyaan dan pengamatan beberapa aspek yang ingin diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pustakawan
2. Pemustaka

A. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PUSTAKAWAN

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023	
INDIKATOR	PERTANYAAN WAWANCARA
Seleksi perpustakaan penerima program	4) Apa saja kriteria dalam pemilihan perpustakaan penerima program inklusi sosial? 5) Bagaimana proses penyeleksian perpustakaan untuk menjadi penerima program yang dilakukan oleh Dispersip Pidie? 6) Perpustakaan mana saja yang sudah dilakukan penyeleksian dan berhasil menjadi perpustakaan penerima program?
Sosialisasi program inklusi sosial	12) Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dispersip Pidie dalam rangka implementasi Program Inklusi Sosial?

	13) Apa saja yang menjadi alasan yang mendasari perlunya pelaksanaan sosialisasi Program Inklusi Sosial oleh Dispersip Pidie?
Master trainer dan mentoring	14) Siapa saja yang berperan sebagai mentor bagi master trainer dalam program pembinaan perpustakaan yang dikelola oleh Dispersip Pidie, mengapa demikian? 15) Bagaimana proses pelaksanaan mentoring terhadap pengelola perpustakaan binaan dalam rangka mendukung implementasi Program Inklusi Sosial?
Fasilitator daerah	16) Bagaimana cara Dispersip Pidie dalam memfasilitasi pengembangan dan implementasi Program Inklusi Sosial? 17) Jenis fasilitas apa saja yang dapat disediakan oleh Dispersip Pidie untuk mendukung pelaksanaan Program Inklusi Sosial?
<i>Stakeholder Meeting</i>	18) Bagaimana mekanisme dan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Dispersip Pidie dalam pertemuan dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terkait implementasi Program Inklusi Sosial?
<i>Peer Learning Meeting</i>	19) Bagaimana agenda yang disusun dalam program pertemuan pemangku sebaya (<i>Peer Learning Meeting</i>)?
Monitoring dan evaluasi	20) Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang diterapkan oleh Dispersip Pidie terhadap perpustakaan binaan yang menerima Program Inklusi Sosial?
Publikasi program	21) Bagaimana cara Dispersip Pidie mempublikasikan program-program yang telah dilaksanakan? 22) Apa saja tujuan yang ingin dicapai dari publikasi program melalui berbagai media?

**A. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PENGELOLA
PERPUSTAKAAN DESA**

Peraturan Kepala Perpunas No. 3 Tahun 2023	
INDIKATOR	PERTANYAAN WAWANCARA
Seleksi perpustakaan penerima program	2) Bagaimana proses penyeleksian yang dilakukan oleh Dispersip Pidie terhadap perpustakaan yang Bapak/Ibu kelola untuk menentukan kelayakan sebagai penerima program inklusi sosial?
Sosialisasi program inklusi sosial	9) Sosialisasi apa saja yang pernah bapak/ibu ikuti yang diselenggarakan oleh Dispersip Pidie? 10) Bagaimana sosialisasi tersebut memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan keinginan bapak/ibu?
Master trainer dan mentoring	11) Bagaimana proses mentoring yang dilakukan oleh master trainer terhadap bapak/ibu sebagai pengelola perpustakaan binaan Dispersip Pidie?
Fasilitator daerah	12) Bagaimana bapak/ibu pernah mengajukan permintaan fasilitas kepada Dispersip Pidie? 13) Fasilitas apa saja yang pernah Bapak/ibu ajukan kepada Dispersip Pidie?
<i>Peer Learning Meeting</i>	14) Bagaimana manfaat yang Bapak/Ibu rasakan dari penyelenggaraan <i>Peer Learning Meeting</i> oleh Dispersip Pidie?"
Monitoring dan evaluasi	15) Bagaimana proses bapak/ibu mengikuti monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dispersip Pidie?
Publikasi program	16) Dispersip Pidie mempromosikan program melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Bagaimana cara bapak/ibu mengetahui kegiatan tersebut?

Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi wawancara dengan pustakawan Dispersip Pidie saat penelitian awal, dilakukan pada 16 Februari 2024.



Dokumentasi wawancara dengan pengelola perpustakaan desa tentang program yang sudah diikuti, dilakukan pada 26 Juli 2024.



Dokumentasi wawancara pustakawan Dispersip Pidie tentang hubungan program dengan peraturan kepala Perpusnas No. 3 Tahun 2023, dilakukan pada 19 Februari 2024.



Dokumentasi wawancara pustakawan Dispersip Pidie tentang program inklusi sosial yang sudah dilakukan, dilakukan pada 25 Juli 2024.

Lampiran 7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khalis Anwar
Tempat, Tanggal Lahir : Pidie, 27 Maret 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Balee Gantung, Glumpang Baro, Pidie
Telp/Hp : 0852-7081-5255
Email : khalisanwar1@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD/MI : MIN 1 Riwat
SMP/MTs : SMPN 1 Kembang Tanjong
SMA/MA : SMAN 1 Mutiara
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Anwar Mahmud
Nama Ibu : Asmiah
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Balee Gantung, Glumpang Baro, Pidie